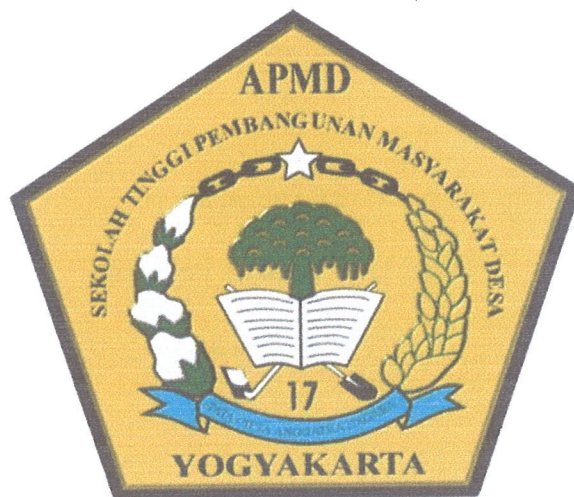


**SKRIPSI**  
**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM**  
**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN**  
**MENENGAH**

(Studi di Padukuhan Jambean Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)



**Disusun Oleh**

**JOZERIZAL ARITD HANIEF TITIT**

**21520065**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**



**HALAMAN JUDUL**

**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

(Studi di Padukuhan Jambean Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan  
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan  
Strata Satu (S1)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

Waktu : Pukul 11.00 s.d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

## TIM PENGUJI

### NAMA

### TANDA TANGAN

Utami Sulistiana, S.P., M.P  
Ketua Penguji/Pembimbing

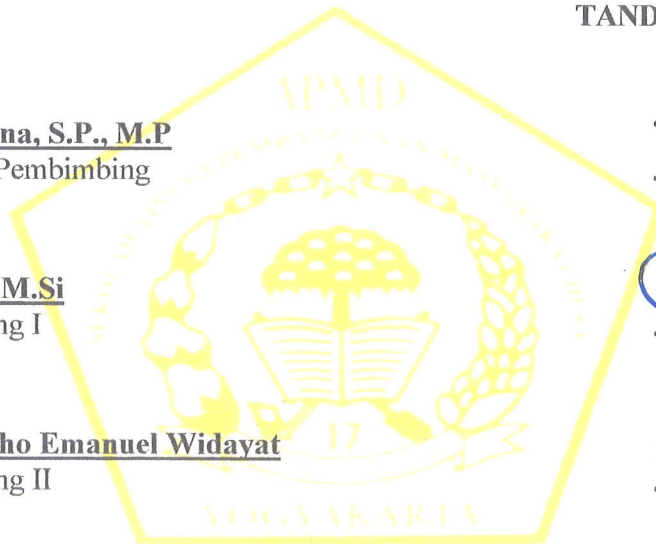
  
.....

Dr. Supardal, M.Si  
Penguji Samping I

  
.....


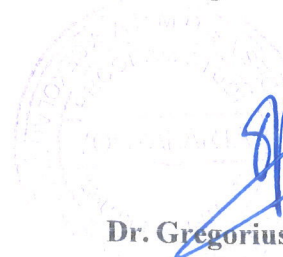
Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat  
Penguji Samping II

  
.....



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jozerizal Aritd Hanief Titit

Nim : 21520065

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten. Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juli 2025



Jozerizal Aritd Hanief Titit

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Jozerizal Aritd Hanief Titit

NIM : 21520065

Telp : 082227173704

Email : [jozerizal2001@gmail.com](mailto:jozerizal2001@gmail.com)

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Y yataan



Jozerizal Aritd Hanief Titit

21520065

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga memberi manfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih karena doa dan dukungan mereka maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai saat ini.
2. Kepada Diri Saya Sendiri “Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan keadaan yang menghiasi perjalanan selama berproses di bangku perkuliahan ini hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.”
3. Teristimewah Kepada Pahlawan, “Cinta pertama penulis dan referensi hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni: **(Alm) Bapak Arnoldus Titit, S. Pd dan Bendaharaku Mama Anike Syufi S. Pd** yang senantiasa memberika semangat, nasihat, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan sosok orang tua yang membuat penulis jauh dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwaa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang selalu disertai dengan doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahan dari anak kalian yang saat ini mulai meranjak dewasa. Terima kasih atas nasihat dan kesabaran yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah hidup penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak dan mama berikan kepada penulis.
4. Kepada Adik-adik tercinta saya, Devroza Titit, Romero Titit, Alosius Irun yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga mampu mengerjakan skripsi hingga selesai.
5. Kepada motivator terhebat **(Alm) Kakek Albertus Syufi** yang selalu memberi nasehat dan Pelajaran hidup kepada penulis hingga sampai saat ini terus berproses sampai selesai.

## **MOTTO**

“Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di tempat yang tersembunyi atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya”

**(Lukas 11: 33)**

“Hanya Para Pembenci Yang tidak Mengakui dan Percaya Kalau Saya Bisa Menyelesaikan Skripsi”

**(Perkara Hidup)**

“Tidak ada kata buruk bagi setiap orang yang melangkah menjadi lebih baik”

**(Jozerizal Aritd Hanief Titit)**

“Tetaplah berusaha, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan besar”

**(Misteri Hidup)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM (Studi di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten. Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta)” Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta 4.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. selaku dosen pembimbing yang sudah berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan serta membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
5. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku dosen penguji satu yang sudah bersedia untuk membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran,



pengetahuan dan gagasannya.

6. Bapak Dr Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku dosen penguji dua yang sudah bersedia untuk membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.
7. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Triwidadi yang telah bersedia dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan kepada para masyarakat Kalurahan Triwidadi yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis ucapkan limpah terima kasih.
9. Kepada Kaka Adrianus Oulaana, S.I.P (Bung Alor) dan Kaka Taufik Hidayat Idris S.I.P yang mana telah banyak membantu, memberikan nasehat dan menyalurkan pemikirannya kepada penulis, terimakasih.
10. Kepada sahabat terbaik saya (Bung Markus, Bung Arif, Bung James, Bung Jackson, Bung Hendra, Gerardo, Paul, Sarinah Widia, Sarinah Lea, Sarinah Aulia) yang sudah banyak mendukung penulis dalam berproses dan menjadi keluarga di tanah rantau, terimakasih.
11. Kepada rumah besar DPK GMNI STPMD APMD Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi.
12. Kepada Honai FOKMAPA STPMD APMD Yogyakarta yang telah menjadi bagi penulis untuk belajar berorganisasi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik

dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
1. Secara Teoritis.....	5

2. Secara Praktis .....	5
F. Literatur Review.....	5
G. Kerangka Konseptual .....	12
1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan .....	12
2. Reformasi Kalurahan .....	14
3. Pengembangan UMKM .....	16
4. Fasilitasi .....	18
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Unit Analisis Data .....	22
3. Teknik Pengumpulan Data .....	23
4. Teknik Analisis Data.....	31
BAB II PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI .....	33
A. Selayang Pandang Kalurahan Triwidadi .....	33
B. Kondisi Geografis .....	36
C. Kondisi Demografi.....	39
D. Sosial dan Ekonomi .....	45
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi .....	53
F. Profil UMKM.....	60
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	62
A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM .....	62

B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM .....	71
BAB IV PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	94
PEDOMAN WAWANCARA.....	96

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian .....	23
Tabel 2. 1 Nama-nama Lurah Sesudah Berdirinya Kalurahan Triwidadi.....	34
Tabel 2. 2 Susunan Pamong Kalurahan Triwidadi.....	54
Tabel 2. 3 Susunan Padukuhan Kalurahan Triwidadi.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	40
Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	42
Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Gambar 2. 5 Sarana Olahraga .....	48
Gambar 2. 6 Sarana Pendidikan .....	49
Gambar 2. 7 Sarana Kesehatan .....	49
Gambar 2. 8 Sarana Peribadaha .....	51
Gambar 2. 9 Struktur Pemerintah Kalurahan Triwidadi .....	54

## INTISARI

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, dimana pembagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang semula berdasarkan aset bersih atau omzet kini beralih ke modal usaha atau hasil penjualan tahunan, sekaligus memberikan kemudahan dalam perizinan, pembiayaan, kemitraan, serta pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun dalam implementasinya di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi, UMKM sebagai bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah mandiri masih menghadapi berbagai kendala seperti sarana yang sederhana, pemasaran terbatas, dan minimnya pendampingan pemerintah, meskipun UU Desa No. 3 Tahun 2024 telah menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk menjalankan empat fungsi utamanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan dukungan dana desa dan fasilitas pemerintah yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis keluarga. Realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kalurahan masih perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mengatasi berbagai keterbatasan akses dan pendampingan, sehingga penelitian ini secara khusus mengkaji kapasitas Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Jambean, Kabupaten Bantul, DIY guna menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif merupakan proses eksplorasi dengan memahami perilaku individu maupun kelompok dan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Triwidadi memiliki yang cukup baik dalam memfasilitasi UMKM melalui program seperti pendataan, pelatihan, pembentukan kelompok usaha, dan penyediaan stand promosi, serta didukung oleh program Desa Prima, Desa Premier, dan kerja sama antar lembaga. Namun, efektivitasnya belum optimal karena belum menjangkau seluruh pelaku UMKM, lemahnya sistem pendataan, rendahnya literasi digital, dan pendekatan yang masih administratif. Selain itu, kendala seperti distribusi informasi yang tidak merata, komunikasi satu arah, dan minimnya partisipasi warga memperlebar ketimpangan dalam program pengembangan ekonomi.

**Kata Kunci: UMKM, Fasilitas , Pemerintah Kalurahan, Pengembangan.**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang juga memuat beberapa perubahan tentang UMKM. Pada PP No. 7 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan dalam kriteria UMKM dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (UU No. 20 Tahun 2008) yang awalnya membagi UMKM menjadi 4 bagian, antara itu adalah Usaha Mikro, Usaha Mandiri, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Dunia Usaha.

Usaha mikro yang dimaksud adalah usaha produktif orang perorang atau badan usaha perorang yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undangan, Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha

dengan jumlah kekayaan bersih tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam PP No. 7 Tahun 2021 ini membahas terkait kriteria UMKM berdasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan, tidak lagi hanya pada aset bersih atau omzet. Pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentu memberikan kemudahan perizinan, pembiayaan dan peminjaman dari pemerintah dan pemerintah daerah, kemitraan, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mesti memberikan alokasi barang atau jasa dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah mesti memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses memfasilitasi dan program pemberdayaan terhadap berjalannya UMKM tersebut sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek.

UMKM merupakan salah satu bentuk UMKM yang berbasis mandiri. Dimana usaha ini dilakukan oleh rumah tangga sebagai bentuk usaha mikro dalam bidang ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pendapatan keluarga agar dapat menunjang kehidupan rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi adalah usaha kecil yang berbasis UMKM mandiri, modal yang digunakan berasal dari masyarakat sendiri dalam mengembangkan usaha tersebut. Usaha ini masih sangat terbatas sebab sarana pra-sarana pendukungnya yang digunakan masih sangat sederhana. Hasil dari usaha tersebut hanya dibeli oleh masyarakat sesuai kebutuhan sehingga masih

minim pendapatnya karena untuk marketingnya masih sangat terbatas dan sulit di jangkau. Ada pun usaha keluarga yang mandiri dan belum tersentuh oleh pemerintah kalurahan. Dengan adanya permasalahan seperti begini tentu ini menjadi perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menangani hal tersebut. Kapasitas pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah tentu dapat melihat secara cepat masalah tersebut dan bisa bergerak untuk mengatasinya.

Dalam UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana membahas tentang 4 tugas dan fungsi Pemerintah Desa itu sebagai berikut: Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini memberi otoritas pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perhatian pemerintah berupa alokasi dana desa dan fasilitas dari pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tentu dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha dan juga dengan perhatian pemerintah memberi dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sebab masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam melihat permasalahan yang dialami di lingkungan masyarakat.

Oleh sebab itu dengan melihat kondisi objektif ini peneliti mengangkat tema: Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM di Padukuhuan Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan,

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana fasilitasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fasilitasi pemerintah dalam pengembangan UMKM.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Jambena, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fasilitasi pemerintah dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Jambena, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini memperbanyak literatur tentang Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan ekonomi. Ada pun melalui penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori tentang kapasitas pemerintah kalurahan pada konteks ekonomi di tingkat paling kecil.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah kalurahan dalam memaksimalkan fasilitasi untuk mengembangkan UMKM. Ada pun sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan dan memproteksi perekonomian berbasis keluarga yang dapat di fasilitasi.

## **F. Literatur Review**

1. Pada Jurnal: *Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019. Oleh Monika Andini dkk, dengan Judul Penelitian *Program Peningkatan Kesejahteraan Kapasitas Keluarga*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: efektivitas program peningkatan kapasitas keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten sudah cukup efektif dilaksanakan, dengan tidak banyaknya hambatan yang dilalui saat program, hal ini berdasarkan keterangan dari pihak terkait. Hasil program peningkatan kapasitas keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sudah tercapai,

peserta mengalami peningkatan dari sisi pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup mandiri. Faktor pendukung dan penghambat dalam program diselenggarakan diantaranya tingkat kehadiran warga belajar kurang maksimal dari pihak penyelenggara terdapat kekurangan dengan keterbatasan penyediaan media belajar (Monika et al., 2019).

2. Pada Jurnal: *Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 5 Tahun 2021.

Oleh Erialdy dkk, dengan Judul Penelitian *Upaya Peningkatan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 Melalui UP2K Di Kelurahan Johar Baru*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: program UP2K merupakan salah satu program unggulan yang dapat menjadi alternatif dalam upaya membangkitkan keluarga dari keterpurukan ekonomi, wadah bagi wanita untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya agar secara mandiri mempunyai keterampilan dan keahlian untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas hidupnya (Erialdy et al., 2021).

3. Pada Jurnal: *Indonesian Journal of Legal Community*, Vol. 1 No. 2 Tahun

2019. Oleh Arifin Saru dkk, dengan Judul Penelitian *Penguatan Kapasitas Ekonomi Dan Sosial Kelompok Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dan Ketahanan Sosial*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memiliki potensi ekonomi agraris yang berasal dari perkebunan yang mereka miliki berupa buah-buahan dan sayuran yang selama ini dijual secara tradisional baik di tempat maupun ke pasar-pasar tradisional di perkotaan. Hanya saja kemampuan untuk ‘presentasi dagangan’ masih

bersifat tradisional juga, belum bisa melakukannya secara modern yang bernilai jual yang selevel dengan yang ada di pasar ritel modern. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Manusia, masyarakat sasaran memiliki banyak remaja lulusan Sekolah Menengah yang masih menganggur dan tidak bisa menyalurkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Model jualan produk perkebunan yang secara turun-temurun dilakukan oleh orang tua mereka, tidak cukup menarik bagi mereka untuk meneruskannya, karena tidak menarik, identik dengan murah dan perlu tenaga yang memadai. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pengabdian lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interest Masyarakat (Saru Arifin et al., 2019)

4. Pada Jurnal: *Administrasi Bisnis*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2020. Oleh Veri Y. Loda, dengan Judul Penelitian *Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha di Daerah Penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penguatan kapasitas belum mampu memberikan motivasi dan pendampingan yang tepat bagi pelaku usaha. Konsep yang dapat dikemukakan sebagai temuan penelitian ini bahwa pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan kelembagaan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui dimensi pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan serta pendampingan untuk memotivasi maupun mengontrol perkembangan usaha. Pengembangan



kapasitas secara kelembagaan usaha berkitan dengan penguatan modal usaha, sarana usaha dan manajemen pengelolaan usaha (Londa, 2020).

5. Pada Jurnal: *Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 23. No 2. Tahun 2018.

Oleh Murdani dkk, dengan judul penelitian *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Kelurahan Kandri adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah (Murdani et al., 2019)

6. Pada Jurnal: *Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No. 2. Tahun 2022, oleh

Fatmawati Ayu dkk, dengan Judul Penelitian *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk UMKM Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kemasan tidak hanya berfungsi sebagai wadah atau pelindung produk, namun juga sebagai sarana iklan dan identitas produk. Untuk itu sangat penting melakukan inovasi dalam proses pengemasan sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan hingga ke pasar nasional. Juga sangat penting diperhatikan bagi para pelaku usaha untuk menggunakan kemasan dengan mempertimbangkan pemilihan warna, dan elemen-elemen yang akan dicantumkan.

7. Pada Jurnal: *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No 2. Tahun 2017.

Oleh Hermanto Lubis, dengan Judul Penelitian *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Strategi menumbuhkembangkan kesadaran dari komunitas ibu rumah tangga nelayan agar berpartisipasi ikut bekerja untuk menunjang sosial ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya bagi nelayan kecil tradisional. 2). Strategi menjadikan komunitas ibu rumah tangga sebagai basis dan memegang peranan sentral dalam mengelola potensi sumber daya sosial-ekonomi rumah tangga. 3). Strategi memanfaatkan kedudukan dan peranan ibu rumah tangga yang merupakan modal sosial untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan. 4). Strategi menerapkan diversifikasi pekerjaan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota dikalangan komunitas ibu rumah tangga (Hermanto, 2017).

8. Pada Jurnal: *Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3. No 1 Tahun

2019. Oleh Ahmadun, dengan Judul Penelitian *Pemberdayaan UMKM Bagi Usaha Keluarga Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kampung Jangkar Desa Mekarwangi Cariu Bogor*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan mempunyai tiga tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dalam tahap penyadaran para pelaku UMKM diberikan motivasi dan dorongan agar mereka memiliki daya dan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam tahap pengkapasitasan diadakan bimbingan dan

penyuluhan dalam pengembangan ragam produk, peningkatan kualitas produk, penyuluhan perijinan dan terdapat pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa pengetahuan dan keterampilan berwirausaha kepada pengusaha makanan kecil dalam mendirikan, mengelola dan mengembangkan usahanya. Lalu dalam tahap pendayaan yaitu para pelaku UMKM makanan kecil di Kampung Jangkar Desa Mekarwangi Cariu Bogo. Dalam meningkatkan kualitas produk dan pemasaran para pelaku UMKM memilih bahan baku yang berkualitas, menggunakan berbagai peralatan yang modern, dan menciptakan inovasiinovasi baru untuk menarik pelanggan (Ahmadun, 2019).

9. Pada Jurnal: *Social Science Research*, Vol. 3 No.2 Tahun 2023. Oleh Asnuryati, dengan Judul Penelitian *Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pengembangan ekonomi sangat penting untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal dalam jurnal ini, penulis mengusulkan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa yang didasarkan pada konsep partisipasi dan pemberdayaan komunitas. Strategi ini melibatkan penggunaan sumber daya lokal, penguatan asosiasi dan koperasi, pemberdayaan wanita dan pemuda,

pengembangan sektor pertanian, industri kecil dan menengah, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa dapat dicapai melalui strategi yang holistik dan terintegrasi, dengan fokus pada pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi lokal. Strategi tersebut dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa (Asnuryati, 2023).

Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pemerintah kalurahan berperan dalam memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Fokus utama penelitian ini terletak pada bentuk dan efektivitas fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kalurahan terhadap UMKM yang umumnya tumbuh dari unit-unit usaha kecil yang dikelola oleh keluarga. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti aspek UMKM secara umum, penelitian ini menekankan bahwa UMKM merupakan entitas yang lebih kompleks dan membutuhkan intervensi yang lebih terstruktur dari pemerintah kalurahan, baik dalam bentuk pendampingan, pelatihan, hingga akses terhadap permodalan dan pasar. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam melihat peran fasilitatif pemerintah kalurahan tidak hanya sebagai pelengkap kebijakan ekonomi lokal, tetapi sebagai aktor kunci dalam ekosistem pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan**

#### **a. Pemerintah Desa**

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah memiliki makna “organ” atau alat dalam hal ini alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan sendiri memberi makna “fungsi” dari pemerintah. Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, Pemerintah Desa merupakan suatu lembaga pemerintah yang secara hirarki pemerintahan berada di skala lokal atau paling bawah. Pemerintah desa juga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat setempat yang berada di dalam wilayah administrasi pemerintah desa tersebut (Undaan, 2014). Dalam hal ini pemerintah desa yang menjalankan roda pemerintahannya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat setempat yang berada dalam bingkai sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus pemerintahannya telah diakui oleh pemerintah pusat dan diatur dalam UU Desa Tahun 2024, No 3. Dalam UU Desa Tahun 2024, No 3 secara eksplisit memberikan 4 kewenangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan hukum ini memberi penguatan kepada

pemerintah desa atas kesatuan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan hal ini maka pemerintah desa dapat mengurus dan mengatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Maka pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi yang lokal dan membantu memfasilitasi masyarakatnya.

Melalui UU Desa, Desa memiliki dua asas yang sangat penting diantaranya asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi merupakan pengakuan dari pemerintah pusat kepada desa terkait dengan hak asal usul desa. Hal ini sebagai bentuk pengakuan negara terkait dengan entitas budaya dan hukum adat yang berada di desa tersebut sehingga Pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur desanya sesuai dengan kearifan lokal sebagaimana mestinya. Asas subsidiaritas merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus desanya (Mardhika, 2023). Melalui kedua asas ini maka secara langsung adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sesuai dengan kearifan lokal dalam mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 4 tugas pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui keempat tugas ini pemerintah desa dapat menjalankan

kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut.

## **2. Reformasi Kalurahan**

Reformasi kalurahan adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, kelembagaan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat agar lebih aktif dalam pembangunan di tingkat kalurahan. Dalam reformasi kalurahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor Tahun 2024 tentang Desa, dalam pasal 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat diaktualisasikan apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Dimana pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk

dari konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai objek pembangunan. Menurut Sumarjdo (dalam Endah, 2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya (Endah, 2020). Sedangkan menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan (Endah, 2020).

Dengan adanya reformasi kalurahan di bidang pemberdayaan masyarakat tentu memberi manfaat besar bagi masyarakat sebab yang awalnya masyarakat sebagai objek pemberdayaan kini telah menjadi subjek dalam pemberdayaan tersebut. Tentu hal ini memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sehingga adanya kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di tingkat kalurahan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam reformasi ini. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera. Penyuluhan dan pendidikan yang berkelanjutan akan memperkuat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan ekonomi dan sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Ini tidak hanya



meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga mempererat hubungan antarwarga dalam membangun kebersamaan.

### **3. Pengembangan UMKM**

Definisi ekonomi secara umum dapat di artikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yakni “oikos” yang berarti keluarga rumah tangga serta “nomos” yang berarti peraturan, aturan dan manajemen keluarga. Menurut Abraham Maslow (dalam Megi Tindangen dkk, 2020) ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui penggabungan seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori, dan prinsip suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif (Megi Tindangen et al., 2020).

Keluarga sendiri merupakan perkumpulan orang yang memiliki hubungan sosial atau pun hubungan darah. UMKM sendiri merupakan proses pengelolaan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupan. Menurut Astuti (2016), UMKM adalah latar belakang UMKM atau orang tua yang diukur dengan tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan,

kepemilikan kekayaan, atau fasilitas serta jenis pekerjaan. Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berdaya.

UMKM merupakan unit usaha terkecil yang dikelola oleh keluarga dan juga seseorang di lingkungan masyarakat berdasarkan status ekonomi maupun pendapatan per-bulan. Menurut Aryani (2017), UMKM adalah segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic need), yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan Pendidikan. Sedangkan menurut Gunartin, dkk (2019), ekonomi keluarga adalah satu disiplin ilmu ekonomi yang menitikberatkan pada unit ekonomi terkecil dan keterlibatannya dalam perjuangan mengangkat manusia dari kemiskinan. Selain itu UMKM tentu memberi dampak signifikan terhadap kemampuan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan dan memberi dampak bagi pertumbuhan UMKM. Maka dari kedua pandangan ini dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha kecil yang dikelola oleh seseorang dalam rumah tangga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya agar terhindar dari kemiskinan dan hal ini dilakukan dengan berbagai upaya dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.

#### 4. Fasilitasi

Dalam dunia yang terus berubah dan semakin kompleks, kemampuan untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan membangun makna bersama menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Di sinilah peran fasilitasi menjadi sangat penting. Fasilitasi bukan sekadar teknik memimpin diskusi, melainkan sebuah pendekatan yang mendalam untuk menciptakan ruang interaksi yang aman, terbuka, dan transformatif.

Teori fasilitasi muncul dari pemahaman bahwa pembelajaran dan perubahan yang bermakna tidak terjadi secara satu arah. Fasilitator tidak bertindak sebagai pemberi materi, melainkan sebagai penjaga proses yang membantu kelompok menemukan pengetahuan dan solusi mereka sendiri. Dalam teori fasilitasi, proses menjadi lebih penting dari isi. Kualitas dialog, partisipasi setara, dan refleksi mendalam merupakan elemen-elemen utama yang menopang terciptanya ruang belajar yang kolaboratif.

Fasilitasi berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap individu membawa pengalaman dan perspektif unik yang berharga. Dengan pendekatan yang inklusif dan dinamis, fasilitator membantu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama. Proses ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil yang dicapai.

Lebih dari sekadar metode, fasilitasi adalah sebuah sikap dan keterampilan. Ia membutuhkan kepekaan sosial, ketegasan dalam menjaga ruang dialog, serta kemampuan untuk menavigasi dinamika kelompok dengan bijak. Ketika dijalankan dengan tepat, fasilitasi mampu menciptakan transformasi baik dalam individu maupun dalam sistem sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, teori fasilitasi menjadi fondasi penting dalam pendidikan partisipatif, kepemimpinan transformatif, serta pengembangan

komunitas dan organisasi. Melalui fasilitasi, kita tidak hanya mengajarkan, tetapi juga belajar bersama; tidak hanya memimpin, tetapi juga memberdayakan.

Fasilitas memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Menurut Kotler dan Keller (2016), fasilitas mencakup sarana fisik dan nonfisik yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara efisien. Dalam konteks keluarga, ketersediaan fasilitas seperti akses internet, transportasi, dan pusat pelatihan keterampilan dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan "Fasilitas yang memadai mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui peningkatan kapasitas produksi", (Kotler & Keller, 2016).

Teori Household Production Function (Becker, 1965) menjelaskan bahwa keluarga bertindak sebagai unit produksi yang memanfaatkan fasilitas untuk menghasilkan barang atau jasa bernilai ekonomi. Misalnya, rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas pertanian modern seperti irigasi dan alat pengolahan hasil panen dapat meningkatkan produktivitas pertanian keluarga. Becker (1965) menyatakan, "Investasi dalam fasilitas rumah tangga tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga mengurangi beban kerja, sehingga anggota keluarga dapat mengalokasikan waktu untuk aktivitas produktif lainnya".

Selain itu, fasilitas pendidikan dan pelatihan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dalam keluarga. Menurut Todaro dan Smith (2020), keluarga yang memiliki akses ke fasilitas pelatihan keterampilan cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja. "Peningkatan kualitas SDM melalui fasilitas pendidikan merupakan kunci dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi" (Todaro

& Smith, 2020). Contohnya, program pelatihan digital bagi ibu rumah tangga dapat membuka peluang usaha berbasis e-commerce, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga.

Pemerintah kalurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Di era desentralisasi dan partisipatif seperti saat ini, fungsi pemerintah kalurahan tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga mencakup peran sebagai fasilitator pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Fasilitasi, dalam hal ini, dipahami sebagai upaya aktif pemerintah kalurahan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Fasilitasi yang dilakukan pemerintah kalurahan bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, sosial, kelembagaan, hingga ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, kalurahan berperan dalam membentuk forum musyawarah, mendorong partisipasi warga, dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Dari sisi ekonomi, fasilitasi diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi lokal secara produktif.

Salah satu wujud nyata dari fasilitasi tersebut adalah dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor penting dalam struktur ekonomi desa yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah kalurahan memiliki posisi strategis untuk mendampingi dan mendorong pertumbuhan UMKM karena kedekatannya dengan pelaku usaha dan pemahaman langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Fasilitasi pengembangan UMKM oleh pemerintah kalurahan dapat berupa penyediaan akses informasi dan pelatihan, pendampingan dalam perizinan usaha, fasilitasi akses permodalan melalui koperasi desa atau lembaga keuangan mikro, serta pembukaan akses pasar melalui kegiatan pameran produk lokal atau digitalisasi usaha. Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat membentuk kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang berfungsi sebagai wadah kolaboratif bagi pelaku UMKM.

Melalui pendekatan fasilitatif yang partisipatif, pemerintah kalurahan tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas dan keberlanjutan usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang dilakukan pemerintah kalurahan bukan hanya sebuah fungsi teknis, melainkan juga perwujudan dari visi pembangunan yang berakar pada kekuatan dan kemandirian komunitas.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif merupakan proses eksplorasi dengan memahami perilaku individu maupun kelompok dan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data lewat pengaturan partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema yang diangkat, dan selanjutnya

memberikan interpretasi makna dari suatu data (Creswell dalam Sugiyono, 2017)

## **2. Unit Analisis Data**

### **a. Objek Penelitian**

Unit analisis ini dilakukan di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta dengan fokus pada Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam studi ini sering disebut sebagai informan. Informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi yang relevan dengan latar penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan dengan ditentukan secara langsung, karena informan tersebut terlibat dalam masalah yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta mampu menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, informan yang dipilih adalah mereka yang dapat memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Informan dalam Penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Profesi	Keterangan
1	Slamet Riyanto	Lurah	Pemerintah Kalurahan
2	Anita Yulita	Carik	Pemerintah Kalurahan
3	Mulyadi	Kasi Ulu-ulu	Pemerintah Kalurahan
4	Sutteknyo	Penjahit	Pelaku UMKM
5	Sarjul	Pedagang	Pelaku UMKM
6	Sarwedih	KWT	Pelaku UMKM
7	Satini	Penjahit	Pelaku UMKM
8	Imas	Pedagang	Pelaku UMKM
9	Susyanti	Pedagang	Pelaku UMKM
10	Yanto	Penjahit	Pelaku UMKM

Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2025.

Pada sasaran pelaku UMKM ini tentu saya melihat bahwa perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat setempat yang memiliki usaha tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian bagi para pelaku UMKM ini.

### c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi adalah proses di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu secara langsung di lokasi penelitian. Dalam observasi ini, digunakan metode pengamatan langsung



terhadap suatu objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengumpulan data dilakukan melalui indra peneliti dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi sering dilakukan ketika informasi tentang masalah yang sedang diteliti masih terbatas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah tersebut, serta kemungkinan petunjuk untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi di mana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM. Hal ini sebagai bentuk pengamatan yang membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan penelitian.

Peneliti telah melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk mengkaji bentuk fasilitasi yang telah diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Observasi ini difokuskan pada beberapa aspek penting, yakni proses fasilitasi, ketersediaan alat produksi, mekanisme pemasaran produk, serta strategi pengembangan ekonomi dan merek.

Dalam pengamatan di lapangan, peneliti menemukan bahwa proses fasilitasi yang dilakukan pemerintah kalurahan masih

bersifat umum dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan spesifik dari para pelaku UMKM. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima, baik berupa pelatihan maupun pendampingan, belum konsisten dan tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menerapkan hasil pelatihan secara optimal ke dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Terkait alat produksi, sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan peralatan manual atau sederhana yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha. Meskipun terdapat bantuan alat dari pemerintah, jumlah dan jenis alat yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi.

Dalam aspek pemasaran, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan platform digital secara optimal. Selain itu, branding produk juga belum dikelola dengan baik, sehingga daya tarik produk di pasar masih rendah. Kurangnya pengetahuan tentang pengemasan dan desain merek menyebabkan produk-produk UMKM sulit bersaing dengan produk dari luar daerah.

Pengembangan ekonomi dan penguatan merek juga masih

menjadi pekerjaan rumah besar. Identitas dan nilai tambah produk lokal belum terangkat secara maksimal. Beberapa pelaku usaha mengaku belum memahami pentingnya diferensiasi produk dan strategi branding yang efektif, yang berdampak langsung pada rendahnya nilai jual produk.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitasi dari pemerintah kalurahan kepada pelaku UMKM sudah ada, namun belum berjalan secara optimal. Diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, agar fasilitasi tersebut benar-benar mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat pelaku UMKM.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman mengenai suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara terarah (Kriyantono, 2020). Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab yang lebih bebas, tanpa mengikuti pedoman pertanyaan yang ketat. Sementara itu, wawancara terarah dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang telah

dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, melalui proses tanya jawab.

Dalam wawancara, peneliti akan mewawancarai pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagaimana ditujukan kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat pelaku usaha tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sampel penelitian yang telah ditentukan.

Pada tahap wawancara, peneliti memulai kegiatan dengan mendatangi kantor Kalurahan Triwidadi guna memperoleh informasi awal mengenai bentuk fasilitasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Wawancara pertama dilakukan dengan Carik Kalurahan Triwidadi, yang memberikan gambaran umum mengenai peran pemerintah kalurahan dalam mendukung pengembangan UMKM, termasuk jenis bantuan yang telah disalurkan serta sasaran program.

Selanjutnya, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ulu-ulu Kalurahan Triwidadi untuk mendapatkan informasi mengenai dukungan teknis, administratif, serta pelibatan kelembagaan dalam proses fasilitasi. Wawancara dilanjutkan dengan Lurah Kalurahan Triwidadi, yang memberikan perspektif strategis dan

kebijakan secara menyeluruh terkait upaya pemerintah kalurahan dalam memberdayakan pelaku UMKM.

Setelah memperoleh informasi dari pihak pemerintah kalurahan, peneliti melanjutkan tahap wawancara dengan informan dari kalangan pelaku UMKM, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan secara selektif berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Wawancara dengan pelaku UMKM diawali dengan seorang penjahit, yang merupakan pelaku usaha di sektor jasa. Melalui wawancara ini, peneliti menelusuri aspek produksi, pemasaran, serta sejauh mana pelaku usaha mendapatkan manfaat dari fasilitasi pemerintah kalurahan. Selanjutnya, peneliti mewawancarai pelaku UMKM di sektor kuliner, yaitu penjual mie ayam, untuk menggali pengalaman mereka dalam menjalankan usaha, termasuk tantangan dan bentuk dukungan yang diterima.

Wawancara kemudian dilanjutkan dengan pelaku usaha dari Kelompok Wanita Tani (KWT), yang merupakan representasi UMKM berbasis komunitas. Informasi yang diperoleh mencakup pola kerja kelompok, pengelolaan usaha secara kolektif, serta keterlibatan mereka dalam program-program pemberdayaan dari pemerintah.

Sebagai penutup rangkaian wawancara, peneliti mewawancarai pelaku UMKM yang menjalankan usaha toko sembako. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh pemahaman mengenai dinamika usaha ritel skala kecil dan sejauh mana fasilitasi pemerintah membantu keberlanjutan usaha mereka.

Seluruh proses wawancara ini dilakukan secara langsung, dengan pendekatan partisipatif dan komunikasi yang terbuka, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dari berbagai pihak, baik dari sisi penyelenggara fasilitasi maupun penerima manfaat. Informasi yang dihimpun dari wawancara ini menjadi bagian penting dalam mengkaji efektivitas fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap penguatan sektor UMKM di Kalurahan Triwidadi

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan bukti otentik yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan alat yang tersedia untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara memadai. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, seperti gambaran umum Kalurahan, sejarahnya yang tercatat dalam profil Kalurahan, kebijakan-kebijakan yang berlaku, serta dokumen berupa gambar, seperti foto. Hasil dokumentasi yang terkumpul kemudian diolah dan

dianalisis untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bukti yang memperkuat temuan atau pun hasil penelitian. Dokumentasi yang dibuat selama proses penelitian, seperti catatan lapangan, wawancara, atau data observasi yang berfungsi bukti yang sah bagi peneliti dan pembaca untuk memverifikasi hasil penelitian.

Dalam proses penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen pendukung guna melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Salah satu dokumen utama yang dikumpulkan adalah profil Kalurahan Triwidadi, yang memuat gambaran umum wilayah, struktur pemerintahan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang ada di kalurahan tersebut.

Dokumen profil ini memberikan informasi kontekstual yang penting untuk memahami latar belakang kebijakan serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kalurahan Triwidadi, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor UMKM. Data dalam dokumen ini juga membantu peneliti dalam menyesuaikan pendekatan analisis terhadap kondisi riil di lapangan.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan wawancara bersama para informan, baik dari pihak pemerintah kalurahan maupun pelaku UMKM. Dokumentasi ini disertakan sebagai lampiran dalam laporan penelitian untuk

memperkuat keabsahan data dan memberikan bukti visual atas interaksi yang telah dilakukan selama proses pengumpulan data.

Dokumen dan dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung validitas dan reliabilitas penelitian, serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika fasilitasi pemerintah terhadap pelaku UMKM di Kalurahan Triwidadi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif menurut Moleong (2007). Data yang diperoleh dalam bentuk ucapan dan tulisan akan diolah dengan cara mengungkapkannya dalam kata-kata atau kalimat, serta mengklasifikasikan seluruh data dan menghubungkan aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, dalam proses analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*).

##### **a. Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses untuk memilah data yang penting dan yang tidak penting, serta mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini



melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola hubungan antar kategori, dan menarik kesimpulan, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun pihak lain.

#### **b. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan, kemudian dianalisis, dideskripsikan, dan direfleksikan (Sugiyono, 2017).

#### **c. Penyajian Data**

Penyajian data adalah hasil dari proses reduksi yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh (Sugiyono, 2017).

#### **d. Penarikan Kesimpulan**

Menurut Sugiyono (2017), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai jenis data dan sumber yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengk

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN TRIWIDADI**

#### **A. Selayang Pandang Kalurahan Triwidadi**

Triwidadi adalah salah satu kalurahan di kapanewon Pajangan, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta. Berdiri pada tanggal 19 Oktober 1946, sekitar satu tahun setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII memberikan maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang berisi pernyataan bahwa wilayah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya juga dilakukan penetaan Organisasi Pemerintahan Daerah Yogyakarta sampai ditingkat kalurahan Pembentukan Dewan Kalurahan dan Penggabungan Kalurahan.

Kalurahan Triwidadi merupakan penggabungan Tiga Kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Kersan, Trucuk dan Sokodadi. Berikut Kalurahan Kersan terdiri dari 11 padukuhan, Kalurahan Trucuk terdiri dari 5 padukuhan, dan Kalurahan Sokodado terdiri dari 6 padukuhan. Melalui musyawarah para tokoh pada masa itu dengan berbagai pertimbangan maka terpilihlah Bapak Harjo Soetomo yang disebut sebagai Lurah di Kalurahan Triwidadi dan selanjutnya dilakukan pemilihan aparatur Kalurahan seperti Carik, Jogoboyo, Kemakmuran, Kamituwo, dan lain sebagainya. Pada tahun 1946 s/d 1988 Bapak Harjo Soetomo menjabat sebagai Lurah Kalurahan Triwidadi. Selanjutnya Kalurahan Triwidadi melaksanakan pemilihan kepala Desa pertama kali diikuti oleh 8 (delapan) calon kepala Desa dan yang terpilih

Bapak Mardiono masa jabatan Tahun 1990 s/d 1998 dan terpilih lagi pada Tahun 1999 s/d 2008. Pada pemilihan kepala Desa berikutnya yang terpilih Bapak Slamet Riyanto menjabat Tahun 2008 s/d 2014 dan Kembali terpilih Tahun 2014 s/d 2020. Dilaksanakan pemilihan Lurah Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan ayat (2) kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam pelaksanaan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah serta Peraturan Bupati Bantul No. 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul No. 4 Tahun 2020 Tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2020. Maka pada pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2020 Slamet Riyanto calon Lurah Triwidadi terpilih untuk masa jabatan Lurah 2021 s/d 2026.

Tabel 2. 1 Nama-nama Lurah Sesudah Berdirinya Kalurahan Triwidadi

No	Periode	Nama	Keterangan
1	1946 s/d 1989	Harjo Sutomo	Seumur Hidup
2	1989 s/d 1997	Mardiyono	Jabatan 8 Tahun
3	1997 s/d 1998	Sugito Ba	PJS
4	1999 s/d 2008	Mardiyono	Perpanjangan 1 th.
5	2008 s/d 2014	Slamet Riyanto	Jabatan 6 Tahun
6	2014 s/d 2020	Slamet Riyanto	Jabatan 6 Tahun
7	2021 s/d sekarang	Slamet Riyanto	Jabatan 8 tahun karena perpanjangan jabatan 2 tahun

Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak berdirinya Kalurahan Triwidadi pada tahun 1946 sampai sekarang dilaksanakan 6 kali pemilihan kepala Desa/Lurah dan secara personal ada empat orang yang menjabat kepala Desa/Lurah.

Kalurahan Triwidadi merupakan satu dari tiga Kalurahan yang berada di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Kalurahan Triwidadi berdasarkan keadaanya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, daerah datar sebesar 20% dan daerah perbukitan 80%. Pada daerah perbukitan, memiliki tebing-tebing yang sangat curam dengan kemiringan 30-80° di beberapa padukuhan (Pemerintah Kalurahan Triwidadi, 2021).

Kalurahan Triwidadi terdiri dari 22 padukuhan yaitu:

1. Padukuhan Guwo
2. Padukuhan Jagonandan
3. Padukuhan Jojoran Wetan
4. Padukuhan Jojoran Kulon
5. Padukuhan Jambean
6. Padukuhan Kayuhan Wetan
7. Padukuhan Kayuhan Kulon
8. Padukuhan Nanggul
9. Padukuhan Kersan
10. Padukuhan Plambongan
11. Padukuhan Sabrang Kidul
12. Padukuhan Sabrang Lor
13. Padukuhan Trucuk

14. Padukuhan Polaman
15. Padukuhan Gampeng
16. Padukuhan Butuh Kidul
17. Padukuhan Butuh Lor
18. Padukuhan Pajangan
19. Padukuhan Blabak
20. Padukuhan Kadiresa
21. Padukuhan Kalisoko
22. Padukuhan Ngincep

## **B. Kondisi Geografis**

### **1. Luas Wilayah**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) Luas wilayah Kalurahan Triwidadi      | : 1111.9675 Ha      |
| b) Tata Guna Lahan Pemukiman             | : $\pm 33.6$ Ha     |
| c) Pertanian                             | : $\pm 223.7445$ Ha |
| d) Perternakan                           | : $\pm 6$ Ha        |
| e) Perikanan                             | : $\pm 1$ Ha        |
| f) Industri dan Pertokoan                | : $\pm 3$ Ha        |
| g) Fasilitas Umum/sosial dan Perkantoran | : $\pm 9.6256$ Ha   |
| h) Perkebunan dan Hutan Rakyat           | : $\pm 916.6866$ Ha |

## **2. Batas Wilayah**

- Utara : Kalurahan Argorejo & Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu
- Selatan : Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
- Timur : Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
- Barat : Kalurahan Argodado Kapanewon Sedayu

## **3. Letak Wilayah**

Kalurahan Triwidadi berada pada ketinggian 110-300mdpl, dengan suhu 20-30 °C, dengan luas wilayah  $\pm$  130 hektar, perbukitan  $\pm$  300 hektar, tanah subur 80 hektar, tidak subur  $\pm$  56 hektar. Luas wilayah keseluruhan  $\pm$  430 hektar.

Jenis tanah di Kalurahan Triwidadi adalah tanah marjinal, yang di tandai dengan struktur tanah yang keras dan pecah-pecah. Lapisan tanah tipis dengan banyak batuan bahan tambang galian atau batu putih, dengan kondisi yang kurang subur (pijiastuti et al, 2018). Dengan kondisi topografi tersebut rasanya tidak memungkinkan apabila masyarakat Kalurahan Triwidadi mengandalkan sektor pertanian pangan dan hortikultura seperti masyarakat perdesahan pada umumnya.

Alam di Kalurahan Triwidadi adalah sebagian besar wilayah perbukitan memiliki tingkat air tanah yang rendah, yang menyebabkan tadah hujan mendominasi. Tingkat erosi tinggi menyebabkan kesuburan tanah menurun, dan ketersediaan air tanah hanya bertahan selama musim hujan dan paling lama empat bulan pada musim kemarau, sehingga sebagian besar wilayah Kalurahan Triwidadi kekeringan.

Sumber air yang ada saat ini sangat terbatas, dan sumber air lainnya jauh dari permukiman.

Kondisi Alam Kalurahan Triwidadi terdiri dari Perkebunan dan lahan pertanian. Jenis tanaman umumnya dapat tumbuh, dan berbagai jenis tanaman obat dapat ditemukan di wilayah tertentu. Tanaman pertanian yang tersedia termasuk padi, jagung, kacang tana, kedelai, dan ketela yang juga dikenal sebagai singkong. Sedangkan untuk jenis hewan yang masih ada dan berkembang di Kalurahan Triwidadi burung drekuku, burung pipit, dan jenis satwa lainnya yang masih ada. Meskipun saat ini jenis burung tersebut banyak di buruh, tetapi masih ada di alam liar.

#### **4. Orbitasi**

- a. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kapanewon Pajangan: 4,00 Km\
- b. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota Bantul: 19,00 Km
- c. Jarak Dari Kota/Ibu Kota Kabupaten Bantul: 12,00 Km
- d. Jarak Dari Ibukota Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 19,00 Km

#### **5. Karakteristik Kalurahan**

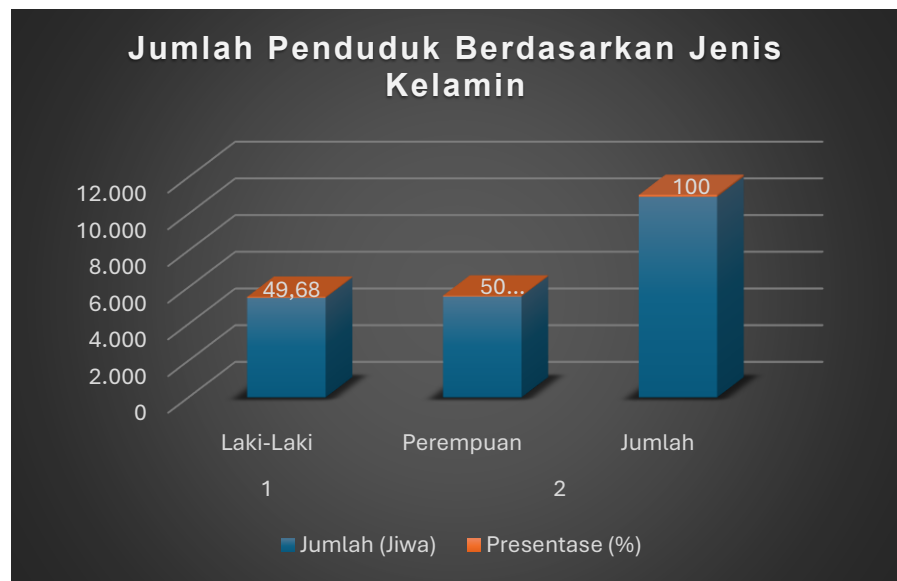
Kalurahan Triwidadi merupakan kawasan peKalurahan yang bersifat Agraris dengan mata pencaharian masyarakatnya Petani, Peternak, kehutanan dan perkebunan. Sector usaha lain dibidang *Home industry* serta sebagai buruh.

## C. Kondisi Demografi

### 1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kalurahan Triwidadi tahun 2024 berjumlah 10.937 jiwa dan terdiri dari 3.590 KK, dapat di ketahui perinciannya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk kalurahan tercatat sebanyak 10.937 jiwa, yang terdiri dari 5.434 laki-laki dan 5.503 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dengan selisih 69 jiwa. Komposisi penduduk yang relatif seimbang ini mencerminkan struktur demografis desa yang stabil dan proporsional. Keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan merupakan modal sosial penting dalam pembangunan desa, baik dalam

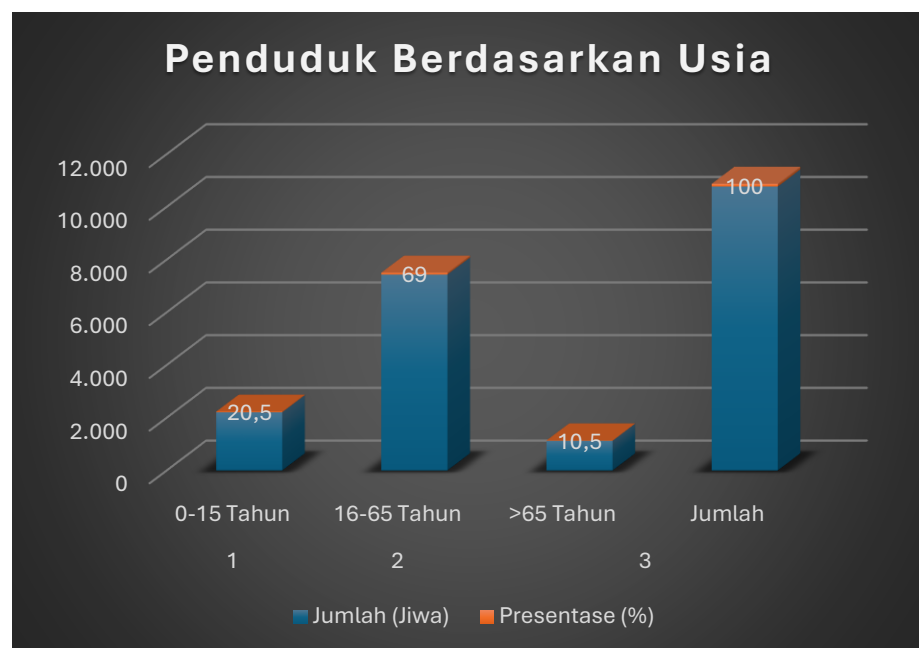


aspek ekonomi, pendidikan, sosial, maupun partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Selisih yang kecil antara kedua jenis kelamin juga menunjukkan bahwa tidak ada dominasi yang mencolok, sehingga kebijakan pembangunan berbasis gender dapat lebih mudah diterapkan secara adil dan merata. Dengan demikian, data ini dapat menjadi pijakan awal dalam perencanaan program-program pelayanan publik, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta strategi pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivitas.

## 2. Penduduk Berdasarkan Usia

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia



Sumber: LPPKal, 2024

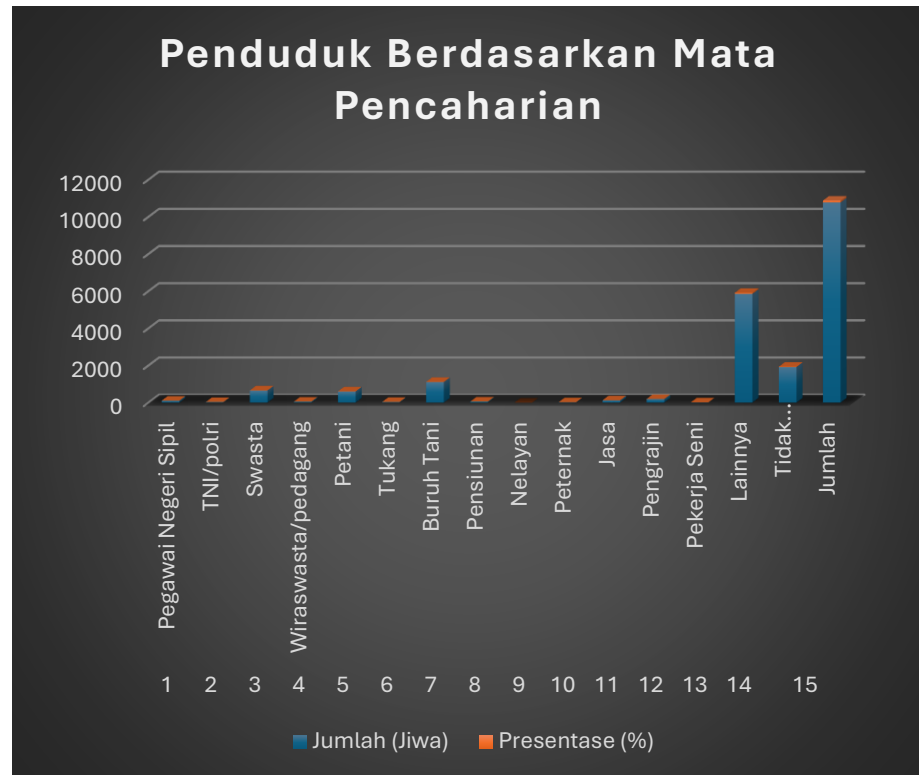
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, usia utama: usia anak-anak dan remaja, usia produktif, serta usia lanjut. Penduduk dengan rentang usia 0–15 tahun berjumlah 2.211 jiwa, atau sekitar

20,3% dari total populasi. Kelompok ini merupakan generasi muda yang masih bergantung pada orang tua atau wali, dan membutuhkan perhatian khusus dalam bidang pendidikan, gizi, dan perlindungan anak. Kelompok usia 16–65 tahun, yang termasuk kategori usia produktif, merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah 7.435 jiwa, atau sekitar 68,3% dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja dan produktivitas ekonomi, asalkan kelompok ini mendapatkan akses yang memadai terhadap lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha.

Sementara itu, kelompok usia di atas 65 tahun tercatat sebanyak 1.128 jiwa, atau sekitar 10,4% dari total penduduk. Jumlah ini menandakan bahwa desa juga memiliki populasi lansia yang cukup signifikan, yang membutuhkan perhatian dalam layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan dukungan keluarga. Dengan dominasi kelompok usia produktif, desa memiliki potensi demografi yang besar untuk mendorong pembangunan. Namun demikian, potensi ini harus dikelola dengan baik melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok usia.

### 3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber: LPPKal, 2024

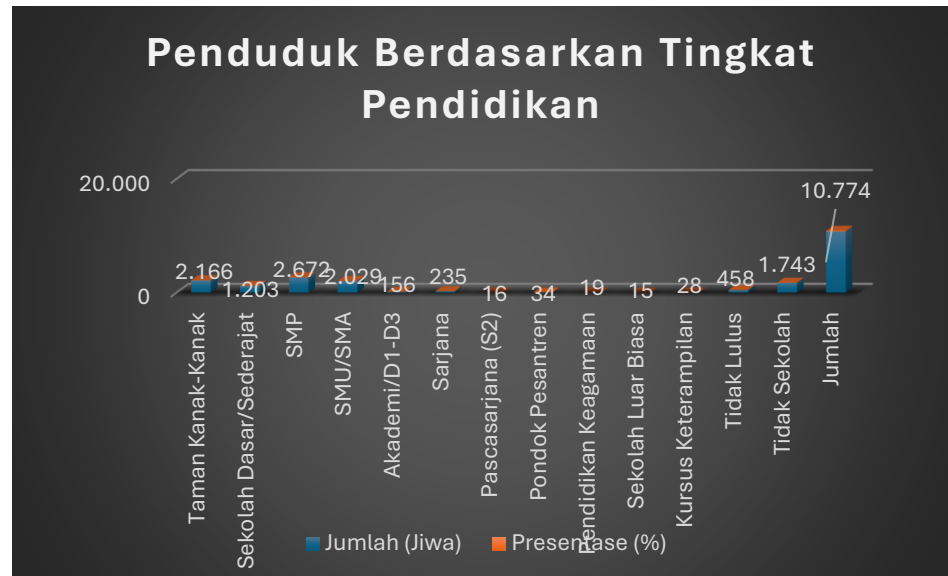
Berdasarkan data dari LPPD Tahun 2024, jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan mata pencaharian sebanyak 10.774 jiwa. Data ini memberikan gambaran penting tentang struktur ekonomi masyarakat desa dan pola kerja yang berkembang di lingkungan tersebut. Dari keseluruhan data, kelompok terbesar berada pada kategori “Lainnya” sebanyak 5.853 jiwa, yang kemungkinan mencakup berbagai jenis pekerjaan informal, belum terklasifikasi secara spesifik, atau mereka yang memiliki aktivitas di luar kategori pekerjaan formal. Selain itu, terdapat 1.918 jiwa yang tidak bekerja atau pengangguran, yang mencerminkan adanya tantangan dalam ketersediaan lapangan kerja

serta perlunya program pemberdayaan ekonomi. Sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi desa, dengan 1.108 jiwa bekerja sebagai buruh tani, serta 603 jiwa sebagai petani, sehingga total kontribusi sektor pertanian mencapai 1.711 jiwa, atau sekitar 15,9% dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada sektor agraris, baik dalam skala kepemilikan lahan sendiri maupun sebagai tenaga kerja harian.

Sementara itu, sektor swasta juga memberikan kontribusi cukup signifikan dengan 653 jiwa, disusul oleh sektor jasa (125 jiwa), pengrajin (196 jiwa), dan wiraswasta/pedagang (55 jiwa), yang menunjukkan adanya keragaman ekonomi dan potensi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun jumlah pegawai negeri (105 jiwa), personel TNI/Polri (32 jiwa), pensiunan (57 jiwa), serta pekerja seni (12 jiwa) masih tergolong kecil secara persentase terhadap populasi. Profesi nelayan (1 jiwa) dan peternak (19 jiwa) menunjukkan bahwa sektor kelautan dan peternakan belum berkembang secara luas di desa ini. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada di sektor informal, agraris, dan tidak bekerja, sehingga perlu strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah seperti pelatihan keterampilan kerja, akses ke permodalan usaha, dan perluasan lapangan kerja produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

#### 4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: LPPKal, 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 10.774 jiwa penduduk, tingkat pendidikan masyarakat desa sangat beragam, mulai dari yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali hingga jenjang pascasarjana. Kelompok terbesar berasal dari lulusan SMP sebanyak 2.672 jiwa, disusul oleh lulusan SMA/SMU sebanyak 2.029 jiwa dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2.166 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengakses pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan modal penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, terdapat pula jumlah yang signifikan belum mengenyam pendidikan formal, yakni sebanyak 1.743 jiwa yang tidak sekolah dan 458 jiwa yang tidak lulus sekolah. Jika digabungkan, ini berarti sekitar 2.201 jiwa (lebih dari 20%) dari total populasi belum

menyelesaikan pendidikan dasar, yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran literasi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi seperti Akademi/D1-D3 sebanyak 156 jiwa, Sarjana sebanyak 235 jiwa, dan Pascasarjana (S2) sebanyak 16 jiwa, masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Ini menunjukkan bahwa akses dan minat terhadap pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Selain jalur pendidikan formal, masyarakat juga mengakses pendidikan non-formal seperti pondok pesantren (34 jiwa), pendidikan keagamaan (19 jiwa), kursus keterampilan (28 jiwa), dan sekolah luar biasa (15 jiwa), yang menunjukkan adanya keberagaman jalur pendidikan sesuai kebutuhan dan latar belakang masyarakat.

## **D. Sosial dan Ekonomi**

### **1. Sosial**

Kehidupan masyarakat di Kalurahan Triwidadi umumnya cukup terorganisir. Ada banyak kelompok sosial di Kalurahan Tiwidadi baik di tingkat padukuhan dan Kalurahan. Di Kalurahan Triwidadi, ada banyak kelompok sosial, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAL), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, RT, Dasa Wisma, Kelompok Arisan/simpan pinjam, Kelopak Jimpitan, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), dan Kelompok Gotong-Royong. Kegiatan sosial, seperti budaya gotong

royong, berlangsung dengan baik di seluruh padukuhan Kalurahan Triwidadi meskipun tidak diatur secara formal.

## **2. Ekonomi**

Kalurahan Triwidadi masi bergantung pada pertanian dan bisnis. Ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang berkerja di dua sektor tersebut. Semua padukuhan di Kalurahan Triwidadi masih berfokus pada pertanian, dengan penduduk bekerja sebagai petani dan sebagai buruh tani. Pertanian terdiri dari tanaman seperti padi dan polowijo. Sektor bisnis yang ada termasuk kerajinan, peternak ayam, bebek, sapi, kambing, perikanan, industry rumah tangga, dan jasa seperti bengkel, fotocopy, rental, dan fotografer. Problem peningkatan ekonomi rakyat sangat rumit, tetapi saat ini kondisi ekonomi rakyat di Kalurahan Triwidadi mulai bangkit dan membaik. Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah lainnya yang juga membantu meningkatkan pendapatan perekonomian rakyat melalui program yang tepat.

## **3. Sarana dan Prasarana, Pemukiman serta Infrastruktur Umum**

### **a) Perumahan**

Kondisi kelas atas Kalurahan Triwidadi mampu membangun rumah untuk satu keluarga, meskipun bentuk dan jenis bangunan bervariasi tergantung pada tingkat keuangan, ada yang permanen dan ada yang semi permanen. Sebagian besar penduduk Kalurahan Triwidadi tinggal dalam satu rumah yang dihuni oleh

dua kepala keluarga, karena orang tua yang suda lanjut usia tinggal Bersama keluarga anaknya atau sebaliknya keluarga anak tinggal mengindung di rumah orang tua mereka. Kondisi pemukiman di Kalurahan Triwidadi hamper sepenuhnya layak dihuni dan memenuhi persyaratan konstruksi bangunan tempat tinggal. Namun, karena kondisi ekonomi tetap berada di garis kemiskinan, beberapa keluarga masih tinggal di rumah tinggal yang tidak layak huni.

#### **b) Jalan**

Jalan nasional lintas tengah (jl. wates) dan jalan nasional lintas Selatan (jl. srandakan) menghubungkan Kalurahan Triwidadi dengan beberapa jalan kabupaten. Jalan-jalan ini menghubungkan wilaya-wilaya di dalam desa dengan wilaya Kalurahan atau Kapanewon yang berbatasan dengannya. Jalan-jalan di Kalurahan Triwidadi umumnya dalam kondisi baik, dengan jalan lingkungan di padukuhan di bangun dengan aspal dan korblok. Walaupun beberapa jalan sudah rusak, terutama di daerah perbukitan, karena kontur tanah yang tidak rata dan kurangnya perawatan, namun kondisinya masih layak untuk perjalanan warga.

#### **c) Jalan Drainase**

Di Kalurahan Triwidadi, banyak jaringan drainase yang tidak memadai atau bahkan belum dibangun. Akibatnya, apabila terjadi hujan lebat, akan terjadi genangan air yang akan memakan



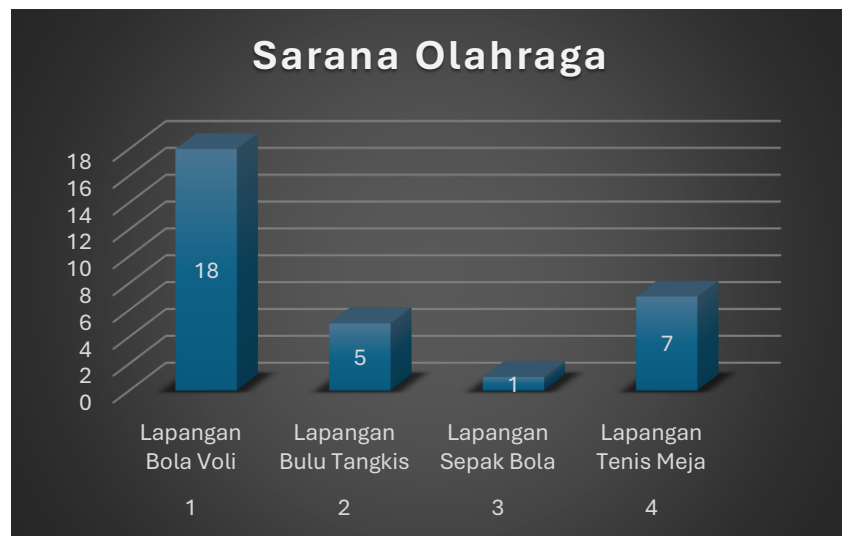
waktu lama untuk meresap dan kering. Jikapun ada saluran drainase, itulah hanya saluran kecil yang tidak diatur dan tidak dirawat.

#### **d) Jaringan Listrik**

Jaringan Listrik di Kalurahan Triwidadi hamper memenuhi seluruh wilayah melalui jaringan PLN, yang telah mencapai wilayah padukuhan. Jadi, semua orang menggunakan Listrik untuk penerangan, kebutuhan rumah tangga, dan kegiatan produktif.

#### **e) Sarana Olahraga**

Gambar 2. 5 Sarana Olahraga



*Sumber:* LPPKal, 2024

Menurut gambar di atas, sarana prasarana umum yang digunakan oleh masyarakat Triwidadi sangat memadai dan dalam kondisi baik.

#### f) Fasilitas Pendidikan

Di Kalurahan Triwidadi, ada fasilitas pendidikan dari PAUD hingga sekolah menengah atas, serta pendidikan non formal. Ada juga panti asuhan dan pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas.

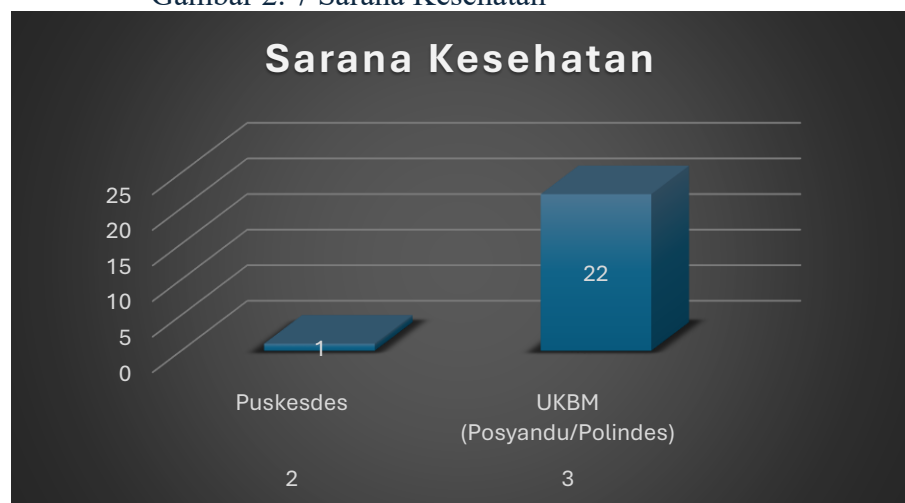
Gambar 2. 6 Sarana Pendidikan



Sumber: LPPKal, 2024

#### g) Sarana Kesehatan

Gambar 2. 7 Sarana Kesehatan



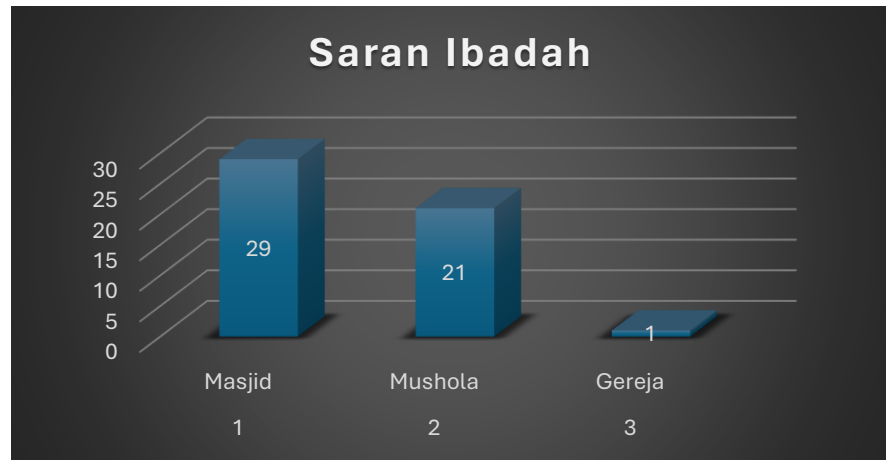
Sumber: LPPKal, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, data LPPD Tahun 2024 terdapat tiga jenis fasilitas kesehatan yang tercatat di desa, dengan total (23) unit fasilitas kesehatan. Dari ketiga jenis tersebut, Puskesmas tidak tersedia di desa ini, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan tingkat dasar belum sepenuhnya terfasilitasi oleh lembaga resmi milik pemerintah di tingkat kecamatan. Ketiadaan Puskesmas menjadi catatan penting dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang lebih komprehensif, seperti pemeriksaan dokter umum, imunisasi lengkap, dan penanganan penyakit menular.

Namun demikian, desa telah memiliki (1) unit Puskesmas (Puskesmas Desa) yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan sederhana, biasanya dikelola oleh bidan desa atau tenaga medis terbatas. Meskipun cakupannya tidak seluas Puskesmas, keberadaan Puskesmas cukup penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar seperti pertolongan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, dan pelayanan kesehatan anak. Yang paling dominan adalah keberadaan 22 unit UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti Posyandu dan Polindes, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warganya. Posyandu sangat vital dalam layanan preventif, seperti imunisasi balita, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyuluhan gizi dan kesehatan ibu-anak.

## h) Sarana Peribadahan

Gambar 2. 8 Sarana Peribadaha



*Sumber:* LPPKal, 2024

Berdasarkan data LPPD tahun 2024, desa ini memiliki total 51 unit fasilitas peribadahan, yang terdiri atas 29 masjid, 21 mushola, dan 1 gereja. Dominasi jumlah masjid dan mushola menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa beragama Islam, yang juga selaras dengan data sebelumnya mengenai sebaran penduduk berdasarkan agama. Keberadaan 31 masjid menggambarkan bahwa kegiatan ibadah berjamaah seperti salat Jumat, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat terfasilitasi dengan baik di berbagai dusun atau lingkungan dalam desa.

Sementara itu, 21 mushola berfungsi sebagai tempat ibadah harian yang biasanya digunakan untuk salat lima waktu, pengajian rutin, serta kegiatan keagamaan skala kecil. Keberadaan mushola juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup dekat terhadap sarana ibadah, yang

menjadi indikator kuatnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial desa. Selain itu, terdapat 1 gereja yang menunjukkan keberadaan minoritas umat Kristen di desa ini. Meskipun jumlahnya tidak besar, keberadaan fasilitas ibadah tersebut mencerminkan bahwa desa tetap memberi ruang bagi keragaman keyakinan dan toleransi antarumat beragama.

**i) Fasilitas Perdagangan Dan Ekonomi**

Fasilitas perekonomian dan perdagangan yang ada di Kalurahan Triwidadi antara lain adalah pasar desa “sudimoro”, tokoh, kios, tempat wisata dan lain-lain yang ada di wilayah Triwidadi sebagai sarana perekonomian dan perdagangan.

**j) Penyelenggaraan Air Bersih, Sanitasi Dan Persampahan**

Untuk penduduk Kalurahan Triwidadi menggunakan sumur-sumur disekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan air bersi mereka setiap hari. Sehingga, Ketika musim kemarau memasuki, wilayah perbukitan sering mengalami kesulitan karena debit sumur air berkurang atau bahkan menjadi kering. Karena infrastruktur yang masih terbatas, layanan air bersi PDAM belum dapat mencapai seluruh wilayah Triwidadi.

Jaringan sanitasi juga masih sederhana, tetapi sudah mengikuti dan memenuhi peraturan serta standar Pembangunan sanitasi yang direkomendasikan pemerintah. Selain itu pengolahan sampah dan limbah rumah tangga masih sangat

sederhana dan terlihat seperti hanya membuang sampah melalui lubang galian tana.

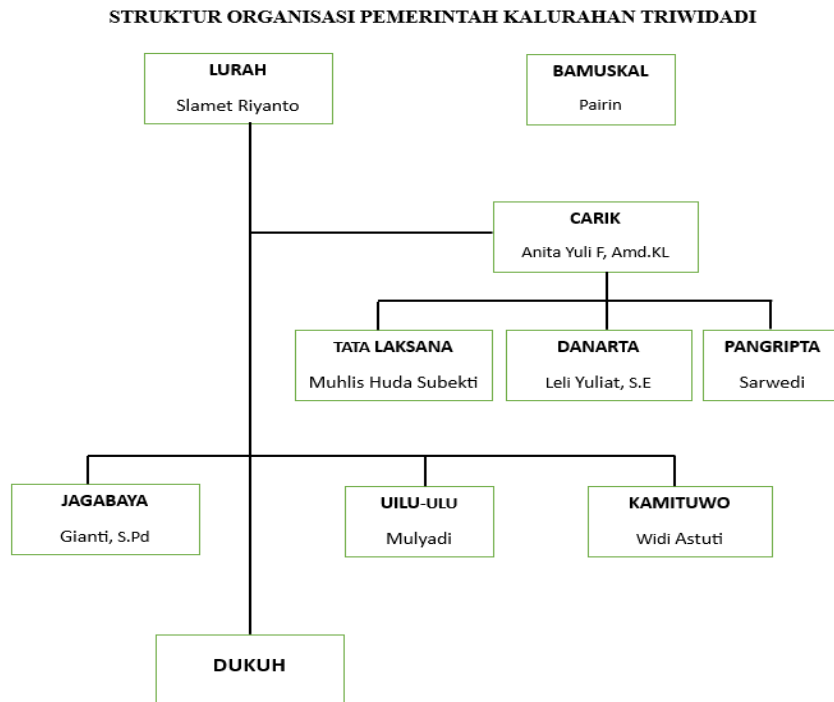
#### **k) Ruang Terbuka Hijau**

Karena sebagian tana kas desa digunakan untuk pertanian, wilayah Kalurahan Triwidadi belum memiliki infrastruktur ruang terbuka hijau. Saat ini, ruang terbuka hijau dapat digunakan sebagai lapangan olahraga atau tana lapang yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga dan aktifitas umum lainnya. Jadi, secara tidak langsung peruntukannya juga terganggu, dan itu tidak dapat dianggap sebagai ruang terbuka hijau

#### **E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi**

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 134 tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan dengan Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 9 Struktur Pemerintah Kalurahan Triwidadi



*Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tahun 2024*

### 1. Susunan Pamong Kalurahan Triwidadi

Tabel 2. 2 Susunan Pamong Kalurahan Triwidadi

No	Nama	Jabatan	Umur	Masa Jabatan
1	Slamet Riyanto	Lurah	47 Tahun	s/d 2028
2	Anita Yulia F, A.Md.KL	Carik	34 Tahun	s/d 2051
3	Giyanti, S.Pd	Kasi Jagabaya	54 Tahun	s/d 2031
4	Mulyadi	Kasi Ulu-ulu	54 Tahun	s/d 2031
5	Widi Astuti	Kasi Kamituwa	50 Tahun	s/d 2035
6	Sarwedi	Kaur Pangripta	57 Tahun	s/d 2028
7	Leli Yuliat, S. E	Kaur Danarta	41 Tahun	s/d 2044
8	Muhlis Huda Subekti	Kaur Tata Laksana	35 Tahun	s/d 2050

*Sumber: LPPKal, 2024*

## 2. Susunan Padukuhan Kalurahan Triwidadi

Tabel 2. 3 Susunan Padukuhan Kalurahan Triwidadi

No	Nama	Jabatan	Umur	Masa jabatan
1	Mukiyo	Dukuh Guwo	60 Tahun	s/d 2025
2	Endung Dasuki	Dukuh Blabak	47 Tahun	s/d 2038
3	Waluyo	Dukuh Gampeng	46 Tahun	s/d 2039
4	Wakimin	Dukuh Nanggul	55 Tahun	s/d 2030
5	Giyono	Dukuh Kersan	42 Tahun	s/d 2043
6	Tumiyo	Dukuh Jojoran Wetan	52 Tahun	s/d 2033
7	Marjiman	Dukuh Jojoran Kulon	42 Tahun	s/d 2043
8	Sapardi	Dukuh Sabrang Lor	59 Tahun	s/d 2026
9	Pardi	Dukuh Sabrang Kidul	57 Tahun	s/d 2028
10	Suyadi	Dukuh Kadireso	59 Tahun	s/d 2026
11	Sudadi	Dukuh Kayuhan Kulon	60 Tahun	s/d 2025
12	Wajiyana	Dukuh Kayuhan Wetan	53 Tahun	s/d 2032
13	Budiyanto	Dukuh Pajangan	59 Tahun	s/d 2026
14	Warsiyo	Dukuh Butuh Lor	60 Tahun	s/d 2025
15	Tri Handayani	Dukuh Butuh Kidul	41 Tahun	s/d 2044
16	Sutarjan, A.Md.	Dukuh Polaman	56 Tahun	s/d 2029
17	Hendi	Dukuh Jambean	37 Tahun	s/d 2048
18	Dwi Janari	Dukuh Trucuk	30 Tahun	s/d 2055
19	Subiyana (Pj)	Dukuh Jagonandan	52 Tahun	s/d 2025
20	Subiyana	Dukuh Ngincep	52 Tahun	s/d 2033
21	Siyem	Dukuh Kalisoko	59 Tahun	s/d 2026
22	Trudiyanto	Dukuh Plambongan	43 Tahun	s/d 2042

Sumber: LPPKal, 2024



Kalurahan Triwidadi adalah salah satu kalurahan yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini berdiri pada tanggal 19 Oktober 1946, satu tahun setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Triwidadi merupakan penggabungan dari tiga kalurahan sebelumnya, yaitu Kalurahan Kersan, Trucuk, dan Sokodadi. Proses penggabungan ini berlangsung melalui musyawarah tokoh masyarakat pada waktu itu. Selama perkembangannya, Kalurahan Triwidadi telah mengalami beberapa kali pemilihan kepala desa/lurah, dengan jabatan pertama kali dipegang oleh Bapak Harjo Soetomo yang menjabat dari tahun 1946 hingga 1988.

Kalurahan Triwidadi berada di wilayah yang sebagian besar terdiri dari perbukitan dengan tingkat kemiringan yang cukup curam, yaitu antara 30-80 derajat di beberapa padukuhan. Hal ini menjadikan Kalurahan Triwidadi memiliki topografi yang khas, dengan tanah marjinal yang keras dan lapisan tanah yang tipis, mengakibatkan kesuburan tanah yang terbatas. Sebagian besar wilayah Kalurahan Triwidadi memiliki potensi erosi yang tinggi, terutama di daerah perbukitan. Sumber air tanah sangat terbatas dan hanya tersedia secara optimal pada musim hujan, sehingga sebagian besar wilayah ini sering mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Penduduk Kalurahan Triwidadi berjumlah 10.875 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 3.554. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat sedikit lebih banyak perempuan (50,29%) dibandingkan laki-laki (49,71%), menunjukkan keseimbangan yang sehat dalam struktur demografi. Dari sisi usia, sebagian besar penduduk berada dalam rentang usia produktif (16-65

tahun), mencapai 69% dari total populasi. Sementara itu, kelompok usia lanjut (>65 tahun) mencatatkan 10,5% dari jumlah penduduk. Mata pencaharian mayoritas penduduk masih berfokus pada sektor pertanian, terutama sebagai buruh tani dan petani, yang mencakup sekitar 15,9% dari total penduduk. Sektor informal dan jasa juga menyumbang angka signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat.

Secara sosial, kehidupan di Kalurahan Triwidadi terorganisir dengan baik melalui berbagai lembaga sosial seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAL), Karang Taruna, PKK, serta kelompok arisan dan gotong-royong. Kehidupan sosial di kalurahan ini tetap mempertahankan tradisi gotong royong yang menjadi budaya masyarakat. Dalam aspek ekonomi, mayoritas penduduk Kalurahan Triwidadi bergantung pada pertanian, meskipun sektor bisnis dan kerajinan juga mulai berkembang. Walaupun banyak penduduk yang masih berada di garis kemiskinan, upaya dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah terus berlanjut untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui berbagai program bantuan.

Terkait Sarana dan Prasarana, Pemukiman, dan Infrastruktur Umum dengan perumahan, sebagian besar rumah di Kalurahan Triwidadi adalah rumah permanen atau semi-permanen, meskipun terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni. Jalan-jalan di Kalurahan Triwidadi umumnya sudah baik, dengan beberapa jalan di perbukitan yang masih membutuhkan perawatan lebih lanjut. Infrastruktur lainnya, seperti jalan nasional yang menghubungkan Kalurahan Triwidadi dengan wilayah lain, mendukung kelancaran mobilitas penduduk. Meski begitu, kondisi jalan di beberapa

daerah perbukitan rusak akibat kontur tanah yang tidak rata dan minimnya perawatan.

Sumber air di Kalurahan Triwidadi sangat terbatas dan sebagian besar bergantung pada air hujan dan sumur. Sebagian besar wilayah di perbukitan memiliki kesulitan dalam akses air bersih, yang mengakibatkan distribusi air tidak merata. Beberapa padukuhan yang lebih dekat dengan sumber air memiliki akses yang lebih baik, sementara padukuhan yang terletak lebih tinggi atau jauh dari sumber air menghadapi kesulitan yang lebih besar. Sebagian besar wilayah Kalurahan Triwidadi telah terjangkau oleh jaringan listrik, namun ada beberapa daerah di perbukitan yang masih bergantung pada sumber daya alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya. Pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tersedia fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pembantu yang melayani masyarakat untuk kebutuhan kesehatan dasar. Namun, untuk pelayanan yang lebih spesifik atau darurat, penduduk harus menuju Puskesmas yang lebih besar di Kapanewon Pajangan atau ke rumah sakit di Bantul. Beberapa fasilitas kesehatan tradisional seperti bidan desa dan posyandu juga berperan penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Masyarakat Kalurahan Triwidadi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan dibantu oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), yang bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Dalam setiap kegiatan, terdapat koordinasi yang baik antara masyarakat dan aparat, sehingga tercipta lingkungan yang relatif aman dan nyaman bagi warga. Kalurahan Triwidadi

memiliki berbagai organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan desa. Di antaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAL), Karang Taruna, dan PKK, yang masing-masing berfokus pada pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, dan pengembangan program berbasis komunitas. Selain itu, ada kelompok-kelompok lain seperti Kelompok Gotong Royong, Arisan, dan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) yang juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersamaan dan memfasilitasi program-program yang berbasis pemberdayaan.

Program pendidikan yang memadai dan layanan kesehatan yang baik menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk memastikan akses yang lebih luas bagi seluruh warga. Program kesehatan seperti Posyandu dan penguatan kesadaran kesehatan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan kondisi geografis yang berbukitan dan subur, perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup menjadi penting. Pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama dalam upaya konservasi tanah dan air, serta pencegahan erosi, yang menjadi masalah utama di wilayah ini. Program penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan edukasi tentang keberlanjutan lingkungan juga menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan desa.

meskipun Kalurahan Triwidadi memiliki potensi besar untuk berkembang, sejumlah tantangan harus dihadapi dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan dalam bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak eksternal akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di Kalurahan Triwidadi. Dengan pendekatan yang tepat, Kalurahan Triwidadi dapat menjadi desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, serta mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya.

#### **F. Profil UMKM Kalurahan Triwidadi**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Triwidadi memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini bergerak di sektor informal seperti usaha kuliner (misalnya warung makan, penjual mie ayam, jajanan tradisional), jasa (seperti penjahit), serta usaha perdagangan harian seperti toko sembako. Selain itu, terdapat pula kelompok usaha berbasis komunitas seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian lokal.

UMKM di Kalurahan Triwidadi umumnya merupakan usaha mandiri berbasis keluarga yang dikelola dengan modal terbatas dan sarana produksi sederhana. Meskipun telah menunjukkan semangat kewirausahaan yang tinggi, para pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses pemasaran, rendahnya literasi digital, dan minimnya pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Pemerintah kalurahan sendiri telah berupaya memberikan fasilitasi melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, pendataan UMKM, pembentukan kelompok usaha, serta penyediaan tempat promosi produk. Beberapa inisiatif seperti Desa Prima dan kerja sama lintas lembaga juga mulai diperkenalkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Namun demikian, jangkauan program yang belum merata dan pendekatan yang masih bersifat administratif menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

Dengan potensi sumber daya lokal dan dukungan kebijakan desa, UMKM di Kalurahan Triwidadi memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya saing, terutama jika disertai dengan pendampingan yang tepat dan kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan.

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan data melalui proses analisis merupakan tahapan penting yang akan ditempuh penulis dalam menyelesaikan dan menjelaskan hasil penelitian di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan keterangan empiris yang diajukan oleh penulis terkait kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara sebagai metode utama, serta dokumentasi sebagai metode pendukung.

##### **A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kalurahan Triwidadi, ditemukan bahwa pemerintah kalurahan telah melakukan berbagai upaya fasilitasi guna mendorong pengembangan UMKM lokal. Fasilitasi ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa dalam memberdayakan pelaku usaha mikro agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan mencakup tiga aspek utama, yaitu bantuan, pelatihan, dan perlindungan.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi telah mencakup aspek-aspek penting yang mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. Fasilitasi ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar usaha, tetapi juga membangun kapasitas serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman. Ke depan, diperlukan penguatan dari sisi

regulasi, kemudahan akses permodalan, dan sistem pendampingan yang berkelanjutan agar UMKM dapat lebih optimal berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **1. Fasilitasi Bantuan Pemerintah Kalurahan Triwidadi**

Dalam aspek bantuan, salah satu bentuk konkret yang diberikan oleh pemerintah kalurahan adalah penyediaan tempat usaha bagi pelaku UMKM. Pemerintah telah memfasilitasi lokasi-lokasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi maupun pemasaran. Bantuan ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan ruang usaha yang kerap menjadi kendala utama bagi UMKM berskala kecil. Dengan tersedianya tempat usaha yang layak dan aman, pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih memadai untuk menjalankan aktivitas ekonominya serta meningkatkan visibilitas produk di lingkungan masyarakat.

Pernyataan di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Mulyadi Selaku Kasih Pemberdayaan sebagai berikut:

Dalam wawancara bersama Kasi Pemberdayaan, dijelaskan bahwa pemerintah desa terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM masyarakat melalui berbagai bentuk fasilitasi. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menyediakan tempat usaha yang dapat disewa oleh masyarakat dengan harga terjangkau, khususnya bagi pelaku UMKM. Selain itu, pengadaan listrik juga menjadi perhatian agar operasional usaha tidak terkendala, terutama di lokasi-lokasi strategis yang baru dikembangkan. Program-program seperti Desa Prima dan Desa Premier menjadi wadah utama dalam mengembangkan potensi usaha berbasis keluarga dan perempuan. “Kami juga rutin memfasilitasi berbagai pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan usaha agar masyarakat memiliki bekal yang cukup dalam mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan,” ungkap Kasi Pemberdayaan. (Wawancara, 16 juli 2025)

Dari hasil wawancara Kasi Pemberdayaan menunjukkan adanya peran aktif pemerintah desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat



melalui pendekatan yang bersifat praktis, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu langkah konkret yang menonjol adalah penyediaan tempat usaha dengan harga sewa yang terjangkau bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini sangat strategis karena mengatasi salah satu hambatan utama pelaku usaha kecil, yaitu keterbatasan akses terhadap ruang usaha yang layak. Fasilitas ini juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi rakyat, khususnya di level akar rumput, yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem ekonomi formal.

Selain penyediaan ruang usaha, perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti listrik menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada aspek pelatihan atau promosi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan teknis yang menjadi prasyarat utama dalam kelangsungan operasional usaha. Terutama di kawasan baru yang sedang dikembangkan, ketersediaan listrik menjadi elemen vital dalam menjamin produktivitas dan efisiensi usaha masyarakat. Program Desa Prima dan Desa Premier yang disebut sebagai wadah utama pengembangan usaha keluarga dan perempuan menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui program terstruktur yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan gender. Ini memperlihatkan keseriusan pemerintah desa dalam mengarusutamakan peran perempuan dan keluarga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi lokal.

Lebih jauh, pelatihan rutin, sosialisasi, dan pendampingan usaha yang terus difasilitasi juga menggambarkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan pemerintah desa melalui fasilitasi, pendampingan, dan pembangunan infrastruktur pendukung merupakan model pemberdayaan

yang menyeluruh dan relevan untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas.



Dokumen Bantuan Tempat Usaha Dari Pemerintah Kalurahan  
Triwidadi

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Carik Kalurahan  
Guwosari Sebagai Berikut:

Dalam wawancara bersama Ibu Carik, saat ditanya mengenai sejauh mana pemerintah memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM, dijelaskan bahwa melalui program Desa Prima, pemerintah desa berfokus pada pengembangan usaha-usaha yang digerakkan oleh perempuan dan keluarga sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mencakup pendampingan UMKM melalui event-event, pelatihan, serta penyediaan stand-stand dalam kegiatan yang berkaitan dengan promosi kebudayaan lokal. Ibu Carik juga menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga didukung oleh peningkatan akses mobilitas seperti perbaikan infrastruktur jalan untuk menunjang aktivitas usaha. “Yang kami tekankan adalah pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan,

agar usaha-usaha yang berkembang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal,” ujar Ibu Carik. (Wawancara, 16 juli 2025)

Dari hasil wawancara Ibu Carik mengungkapkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memperkuat UMKM melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis gender, khususnya melalui program *Desa Prima*. Fasilitas yang diberikan pemerintah desa cukup komprehensif, mencakup pendampingan UMKM, penyelenggaraan event-event promosi, pelatihan, dan penyediaan stand usaha, terutama dalam kegiatan yang mengangkat kebudayaan lokal. Ini menunjukkan adanya integrasi antara sektor ekonomi dan budaya sebagai strategi membangun identitas lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini penting dalam memperkuat daya tarik produk lokal yang khas dan bernilai tambah.

Salah satu poin strategis yang sangat penting dari pernyataan Ibu Carik adalah pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak sekadar melakukan pendekatan *top-down*, tetapi mengedepankan prinsip partisipatif yang memberdayakan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, kegiatan yang dijalankan lebih berakar pada kebutuhan riil dan potensi lokal, sehingga berpeluang besar untuk berkelanjutan. Pendekatan seperti ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, tetapi juga memperkuat kapasitas kolektif desa dalam menghadapi tantangan ekonomi secara mandiri.



Dokuen Pelatihan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi

## 2. Fasilitas Pemasaran Pemerintah Kalurahan Triwidadi

Selanjutnya, dalam aspek pelatihan, pemerintah kalurahan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang relevan dengan kebutuhan UMKM, khususnya pelatihan digital marketing dan pengemasan produk. Pelatihan digital marketing diarahkan pada pemanfaatan media sosial dan platform daring sebagai sarana promosi dan penjualan, sehingga produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk kalangan milenial dan konsumen digital. Sementara itu, pelatihan pengemasan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual dan standar kebersihan produk, agar lebih kompetitif di pasar modern. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pemasaran serta mendukung kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Pernyataan di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“Dalam wawancara bersama Pak Lurah, saat ditanya mengenai kebijakan dalam pengembangan UMK, dijelaskan bahwa kalurahan saat ini tengah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memetakan potensi ekonomi lokal secara lebih tepat. Pemerintah memberikan berbagai bentuk fasilitasi seperti pelatihan digital marketing, pelatihan pengemasan produk, pembagian kelompok sesuai jenis profesi, serta mengadakan berbagai event yang melibatkan seluruh pelaku UMKM, yang mayoritas merupakan usaha keluarga dan kelompok kecil. Selain itu, disiapkan pula stand-stand usaha yang difasilitasi oleh pemerintah, serta dorongan bagi pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha agar lebih tertata dan berpeluang mendapatkan dukungan yang sesuai. Namun, Pak Lurah juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya minat sebagian masyarakat untuk terlibat karena keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan teknologi. Kami terus berupaya memberikan motivasi dan pendekatan langsung agar masyarakat mau terlibat aktif, karena potensi UMKM sebenarnya sangat besar jika dikelola dengan baik, ujar Pak Lurah". (Wawancara, 16 juli 2025)

Dari hasil wawancara dari Pak Lurah menunjukkan adanya keseriusan pemerintah kelurahan dalam mendorong pengembangan UMKM melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Strategi awal yang dilakukan adalah melakukan pendataan UMKM secara menyeluruh, yang menjadi fondasi penting untuk memetakan potensi ekonomi lokal secara akurat. Langkah ini mencerminkan pendekatan berbasis data yang sistematis agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Selain itu, upaya fasilitasi yang dilakukan pemerintah cukup beragam dan menyasar pada kebutuhan riil UMKM, seperti pelatihan digital marketing dan pengemasan produk. Ini menandakan adanya pemahaman terhadap tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha kecil, terutama dalam aspek pemasaran dan daya saing produk. Pembagian pelaku usaha dalam kelompok berdasarkan jenis profesi juga menjadi langkah strategis untuk mempermudah koordinasi, pembinaan, serta penyelenggaraan kegiatan yang lebih relevan.

Kegiatan seperti event UMKM dan penyediaan stand usaha menunjukkan adanya dorongan pemerintah untuk menciptakan ruang promosi dan interaksi langsung antara pelaku UMKM dan konsumen. Upaya mendorong kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga penting sebagai

bagian dari legalisasi dan formalisasi usaha, yang membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk mengakses bantuan pemerintah maupun sektor swasta. Namun demikian, Pak Lurah juga secara jujur mengakui masih adanya hambatan struktural dan kultural, seperti rendahnya partisipasi masyarakat karena keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan teknologi.



Dokumen Pelatihan Digital Marketing Oleh Pemerintah Kalurahan Triwidadi

### 3. Fasilitas Perlindungan Dari Pemerintah Kalurahan Guwosari

Pada aspek perlindungan, meskipun hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus di tingkat kalurahan yang secara formal mengatur perlindungan UMKM, pemerintah tetap menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan usaha mikro, terutama dari sisi keamanan usaha. Upaya ini dilakukan melalui penataan wilayah, pengawasan lingkungan, serta dukungan sosial dari lembaga desa dan tokoh masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif. Meskipun belum berbentuk kebijakan hukum, pendekatan ini mencerminkan bentuk perlindungan non-regulatif yang cukup berarti bagi pelaku UMKM di tingkat desa.

Pernyataan di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut

“Memang, sampai saat ini kami belum memiliki regulasi khusus di tingkat desa yang secara formal mengatur perlindungan bagi pelaku UMKM. Namun, perlindungan dari sisi sosial tetap kami upayakan secara

berkelanjutan. Kami menyediakan tempat usaha dengan harga sewa yang terjangkau, memastikan akses listrik bagi lokasi usaha, dan terus mendorong tumbuhnya UMKM melalui program seperti Desa Prima dan Desa Premier. Selain itu, kami juga rutin mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan agar pelaku usaha, khususnya yang berbasis keluarga dan perempuan, tetap mendapat dukungan untuk mengembangkan usahanya secara mandiri,” jelas Kasi Pemberdayaan Kalurahan Triwidadi. (Wawancara, 16 Juli 2025)

Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Kalurahan Triwidadi menunjukkan bahwa meskipun hingga saat ini belum terdapat regulasi formal di tingkat desa yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, pemerintah kalurahan tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial. Perlindungan ini dilakukan melalui berbagai bentuk fasilitasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung keberlangsungan UMKM lokal.

Salah satu bentuk perlindungan sosial tersebut adalah penyediaan tempat usaha yang dapat disewa oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Langkah ini dinilai efektif dalam mengatasi keterbatasan ruang usaha yang sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM, terutama usaha skala mikro yang berbasis keluarga. Selain itu, pemerintah kalurahan juga memperhatikan aspek teknis operasional seperti pengadaan akses listrik di lokasi-lokasi strategis, guna memastikan kelancaran kegiatan produksi dan pemasaran.

Lebih lanjut, pemerintah kalurahan juga aktif mendorong pertumbuhan UMKM melalui program pemberdayaan seperti *Desa Prima* dan *Desa Premier*, yang berfokus pada pengembangan usaha berbasis keluarga dan perempuan. Program-program ini menjadi wadah

penting dalam mempromosikan kewirausahaan inklusif serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Selain dukungan fisik dan programatik, fasilitasi juga diberikan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan usaha yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam hal manajemen, pemasaran, dan keberlanjutan usaha. Pendekatan ini mencerminkan bentuk perlindungan sosial non-regulatif yang diterapkan secara konsisten oleh pemerintah kalurahan, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Dengan demikian, meskipun belum terdapat instrumen hukum formal di tingkat kalurahan, upaya fasilitasi yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap UMKM di Triwidadi tetap berjalan melalui pendekatan sosial dan partisipatif yang berorientasi pada keberlanjutan.

## **B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM**

Hasil observasi yang dilakukan di Kalurahan Triwidadi menunjukkan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung (pendorong) maupun yang menjadi tantangan (penghambat). Keberadaan faktor-faktor ini sangat memengaruhi efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan serta keberlanjutan usaha para pelaku UMKM itu sendiri.



## 1. Faktor Pendorong Pengembangan UMKM

Beberapa faktor pendorong utama yang berhasil diidentifikasi berasal dari peran aktif pemerintah desa dan partisipasi komunitas lokal dalam mendukung pelaku UMKM. Salah satu informan yang bekerja sebagai penjahit menyampaikan bahwa pemerintah kalurahan telah memberikan pelatihan keterampilan menjahit, bantuan mesin jahit, serta dukungan modal awal untuk memulai usaha. Fasilitasi tersebut sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka peluang usaha mandiri di bidang konveksi rumahan.

Selain itu, keberadaan Koperasi Merah Putih juga disebut sebagai salah satu faktor pendorong penting. Informan yang menjadi anggota koperasi tersebut mengungkapkan bahwa koperasi berfungsi sebagai sarana yang baik untuk berjejaring, berbagi informasi usaha, serta memperoleh akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Koperasi menjadi wadah kolektif yang memperkuat solidaritas antar pelaku usaha kecil dan mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal yang inklusif.

Dari kelompok UMKM yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), faktor pendorong lainnya adalah adanya bantuan bibit tanaman dari pemerintah kalurahan. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan kebun pekarangan produktif sebagai sumber pangan keluarga sekaligus peluang usaha kecil. Program ini mendukung peningkatan ketahanan pangan rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pernyataan di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut

Dalam wawancara bersama Bapak Sutteknyo, salah satu pelaku usaha jahit di kalurahan Padukuhan Jambean, disampaikan bahwa beberapa tahun lalu pemerintah kalurahan pernah mengadakan pelatihan menjahit yang bersifat kelompok. Dalam program tersebut, peserta sempat diberikan mesin jahit dan modal awal, yang pada saat itu cukup membantu untuk memulai usaha. Namun, menurut Bapak Sutteknyo, masih banyak pelaku usaha jahit lainnya yang belum tersentuh oleh program serupa. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini, pemasaran atau marketing hasil jahitan masih dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, karena belum ada dukungan dalam bentuk pelatihan digital marketing atau akses pasar dari pihak kalurahan. “Pemerintah belum bisa menjadi perpanjangan tangan dalam hal pemasaran, jadi kami mencari pelanggan sendiri, bahkan modal usaha terkadang harus dipinjam dari BRI,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat sering kebingungan dalam menyampaikan aspirasi karena tidak tahu harus disampaikan kepada siapa dan lewat jalur apa. Harapannya, setiap usaha kecil keluarga, termasuk UMKM, bisa dirangkul dan dikelompokkan oleh pemerintah agar komunikasi, pengembangan usaha, dan pendampingan bisa berjalan lebih terarah dan efektif. (Wawancara, 17 juli 2025)

Dari hasil wawancara Bapak Sutteknyo memberikan gambaran yang jujur dan reflektif mengenai dinamika pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di tingkat kalurahan, khususnya di sektor usaha jahit. Program pelatihan menjahit yang pernah diselenggarakan pemerintah kalurahan, lengkap dengan pemberian mesin dan modal awal, merupakan bentuk fasilitasi yang pada awalnya sangat membantu pelaku usaha dalam memulai kegiatan ekonomi produktif. Namun, terbatasnya cakupan program tersebut, yang belum menjangkau banyak pelaku usaha sejenis lainnya, menjadi catatan penting mengenai ketimpangan akses dalam distribusi bantuan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa intervensi pemerintah belum menyentuh seluruh potensi usaha lokal secara merata.

Lebih lanjut, tantangan utama yang disoroti adalah tidak adanya dukungan berkelanjutan, khususnya dalam hal pemasaran hasil produksi. Ketergantungan pelaku usaha terhadap pemasaran mandiri dan keterbatasan akses pada pelatihan digital marketing memperlihatkan bahwa pengembangan usaha belum sepenuhnya didukung dari hulu ke hilir. Ketiadaan peran aktif pemerintah sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pasar menunjukkan masih lemahnya fungsi kelembagaan dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif. Kondisi ini diperparah oleh kesulitan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, yang menandakan adanya hambatan komunikasi struktural antara warga dan pemerintah desa. Ketidakjelasan saluran aspirasi berisiko melemahkan partisipasi warga dalam proses pembangunan ekonomi lokal.

Usulan Bapak Sutteknyo agar pemerintah merangkul dan mengelompokkan para pelaku UMKM merupakan masukan yang sangat strategis. Dengan adanya pengelompokan yang sistematis, komunikasi, pendampingan, dan pembinaan usaha dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Pemerintah desa perlu membangun sistem yang tidak hanya fokus pada bantuan awal, tetapi juga memastikan adanya kesinambungan dalam hal pelatihan, pemasaran, akses pembiayaan, dan saluran aspirasi. Hal ini sangat krusial agar usaha-usaha kecil berbasis keluarga dapat tumbuh secara mandiri namun tetap berada dalam ekosistem yang saling mendukung, terintegrasi, dan mendapat fasilitasi yang memadai.



Dokuen Mesin Jahit yang diberikan Pemerintah Kalurahan  
Triwidadi Kepada Bapak Sutejo

Berdasarkan penjelasan dan beberapa pernyataan diatas selanjutnya ada penjelasan juga dari Bapak Sarjul yang mangatakan bahwa:

Dalam wawancara bersama Bapak Sarjul, salah satu warga yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan UMKM, disampaikan bahwa saat ini mulai ada inisiatif dari internal kalurahan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk merangkul masyarakat yang memiliki usaha mandiri agar dapat bergabung dalam satu wadah bersama. Koperasi ini dirancang untuk menjadi tempat bernaung bagi pelaku usaha kecil, dengan sistem setor hasil sebesar seratus ribu rupiah per bulan. Menurut Bapak Sarjul, meskipun ide ini sangat baik untuk memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat, sosialisasinya masih terbatas pada internal kalurahan dan belum menjangkau warga secara luas. “Harapan kami, koperasi ini bisa segera disosialisasikan secara menyeluruh, karena banyak warga yang memiliki usaha kecil namun belum tergabung dalam jaringan yang bisa saling mendukung. Kalau dikelola dengan baik, koperasi ini bisa menjadi jalan keluar bagi penguatan usaha mandiri di tingkat desa,” tegas Bapak Sarjul. (Wawancara, 17 juli 2025)

Dari hasil wawanacra Bapak Sarjul memberikan gambaran

mengenai munculnya inisiatif pemberdayaan ekonomi dari tingkat akar rumput yang patut diapresiasi, yakni dengan adanya pembentukan *Koperasi Merah Putih* di lingkungan kalurahan. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berbasis solidaritas dan gotong royong. Pembentukan koperasi merah putih sebagai wadah pelaku usaha kecil merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung, sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha mandiri agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Skema iuran bulanan sebesar seratus ribu rupiah menunjukkan adanya semangat kontribusi dan kemandirian dalam membangun modal sosial dan finansial secara kolektif.

Namun, kendala yang disampaikan terkait terbatasnya sosialisasi menjadi catatan penting. Meskipun gagasan koperasi merah putih ini sangat potensial, kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat luas dapat menghambat partisipasi dan efektivitas program. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah inisiatif tidak hanya bergantung pada gagasan awal yang baik, tetapi juga pada strategi komunikasi yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Kurangnya keterlibatan warga yang memiliki usaha kecil karena belum tersosialisasi secara menyeluruh menciptakan kesenjangan partisipatif yang perlu segera diatasi.

Pernyataan Bapak Sarjul juga menyoroti pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional dan transparan agar kepercayaan

masyarakat dapat terbangun dan terus meningkat. Jika dikelola dengan baik, koperasi merah putih ini tidak hanya menjadi sarana penghimpun modal, tetapi juga pusat distribusi informasi, pelatihan, dan bahkan akses pasar bagi anggotanya. Oleh karena itu, peran pemerintah desa atau pengurus kalurahan dalam mendukung sosialisasi dan penguatan kelembagaan koperasi menjadi sangat penting. Inisiatif semacam ini merupakan bukti bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya datang dari atas (top-down), tetapi juga bisa tumbuh dari bawah (bottom-up), yang justru lebih kuat karena didorong oleh kebutuhan dan semangat warga itu sendiri.



Dokumen Tempat Usaha Bapak Sarjul

Selanjutnya ada penjelasan juga dari Ibu Sarwedih yang mengatakan bahwa:

Dalam wawancara bersama Ibu Sarwedih, salah satu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), disampaikan bahwa pemerintah kalurahan memang telah memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang memiliki usaha tani, terutama dalam bentuk bibit dan dukungan pemasaran hasil pertanian. Namun, menurutnya, kualitas bibit yang diberikan masih kurang optimal sehingga beberapa anggota KWT memilih untuk membeli bibit sendiri dengan kualitas yang lebih baik agar hasil taninya lebih maksimal. Ibu Sarwedih juga mengungkapkan bahwa kegiatan KWT sempat mengalami kevakuman dan baru diaktifkan kembali beberapa bulan terakhir. Meski demikian, hingga saat ini belum ada progres nyata yang dapat dijalankan karena setelah KWT dibentuk kembali, pemerintah belum memberikan bantuan atau dukungan lanjutan. “Karena belum ada program atau fasilitas yang turun, untuk sementara kami lebih fokus pada kegiatan sosial seperti arisan dan pertemuan rutin, sambil menunggu tindak lanjut yang lebih konkret,” ujar Ibu Sarwedih. (Wawancara, 17 juli 2025)

Dari hasil wawancara Ibu Sarwedih mencerminkan dinamika kompleks dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di sektor pertanian, khususnya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). Dukungan pemerintah kalurahan berupa pemberian bibit dan bantuan pemasaran merupakan langkah awal yang patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha tani perempuan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dan kebutuhan riil petani. Kualitas bibit yang kurang optimal menjadi contoh nyata bahwa intervensi pemerintah masih bersifat generik dan belum mempertimbangkan

aspek teknis yang krusial bagi keberhasilan produksi. Hal ini menyebabkan beberapa anggota KWT mengambil inisiatif sendiri dengan membeli bibit berkualitas, yang justru menambah beban biaya mereka.

Selain itu, keberlangsungan kelembagaan KWT tampaknya masih lemah. Kevakuman yang sempat terjadi dan kurangnya tindak lanjut pasca-aktivasi ulang menunjukkan belum terbangunnya sistem pendampingan dan keberlanjutan program secara serius. Meski kelompok ini telah dibentuk kembali, ketiadaan program lanjutan atau fasilitasi konkret dari pemerintah membuat aktivitas KWT belum mampu bergerak ke arah produktif. Fakta bahwa kegiatan mereka saat ini lebih difokuskan pada aktivitas sosial seperti arisan dan pertemuan rutin menunjukkan adanya potensi sosial yang hidup, namun belum terarahkan secara maksimal ke ranah ekonomi produktif.

Situasi ini menjadi cerminan penting bagi pemerintah kalurahan agar tidak hanya fokus pada pembentukan kelembagaan secara administratif, tetapi juga perlu menjamin kesinambungan program, kualitas bantuan, dan pendampingan yang tepat. Pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil sangat dibutuhkan agar KWT dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi perempuan di desa, bukan sekadar forum sosial. Ke depan, perencanaan yang lebih partisipatif, evaluasi mutu bantuan, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci agar KWT benar-benar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian keluarga.





Dokumen Pemberian Bibit Tanaman Kepada PeKWT

## 2. Faktor Penghambat Pengembangan UMKM

Di sisi lain, hasil observasi juga menemukan beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Triwidadi. Salah satu kendala yang sering muncul adalah ketimpangan dalam distribusi bantuan. Tidak semua pelaku UMKM mendapatkan bantuan secara merata, baik dalam bentuk alat, modal, maupun pelatihan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha yang sudah terfasilitasi dengan yang belum tersentuh program pemberdayaan.

Selain itu, dari informan yang tergabung dalam KWT, terdapat keluhan bahwa benih tanaman yang diberikan oleh pemerintah kalurahan tidak sesuai kualitas atau kebutuhan lokal. Bibit yang kurang adaptif terhadap kondisi lingkungan menyebabkan hasil panen tidak

optimal dan menurunkan motivasi anggota kelompok dalam melanjutkan program pertanian pekarangan.

Pernyataan di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut

Dalam wawancara bersama Ibu Satini, salah satu pelaku usaha mandiri di kalurahan Padukuhan Jambean, disampaikan bahwa usahanya telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun secara konsisten. Meskipun usahanya sudah cukup lama berdiri, hingga saat ini ia belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan. Tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha pun merupakan bangunan sewa milik pemerintah kalurahan. Ibu Satini juga menyampaikan bahwa belum ada upaya dari pemerintah dalam memberikan pengembangan keterampilan atau pelatihan yang berkaitan dengan digital marketing, padahal menurutnya, penguasaan teknologi dan pemasaran digital sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar. “Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam memberikan pelatihan dan pendampingan yang bisa membantu kami mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi,” ujar Ibu Satini. (Wawancara, 18 juli 2025)

Dari hasil wawancara Ibu Satini mengungkapkan realitas penting terkait kesenjangan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi yang masih terjadi di tingkat kalurahan. Meski telah menjalankan usaha secara mandiri selama kurang lebih 15 tahun sebuah bukti konsistensi dan ketahanan UMKM fakta bahwa Ibu Satini belum pernah mendapatkan akses pelatihan atau sosialisasi dari pemerintah desa menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program pemberdayaan belum merata dan cenderung kurang menyentuh pelaku usaha yang sebenarnya potensial. Ketidakterlibatan pelaku usaha berpengalaman seperti Ibu Satini dalam kegiatan pelatihan menunjukkan lemahnya basis data dan mekanisme pendataan pelaku UMKM yang dimiliki pemerintah kalurahan, sehingga program-program yang diluncurkan belum sepenuhnya menjangkau pihak yang membutuhkan.

Lebih jauh, keluhan mengenai minimnya pelatihan di bidang digital marketing menggarisbawahi lemahnya integrasi teknologi dalam kebijakan pengembangan UMKM di desa. Dalam konteks ekonomi saat ini yang semakin bergantung pada platform digital, kemampuan memasarkan produk secara online menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku usaha tidak tertinggal dalam persaingan pasar. Ketiadaan pelatihan digital marketing dari pemerintah menunjukkan bahwa fasilitasi belum diarahkan secara progresif untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar modern. Hal ini berpotensi membatasi jangkauan usaha-usaha lokal, meskipun produk mereka mungkin memiliki daya saing yang baik.

Harapan Ibu Satini agar pemerintah lebih memperhatikan pelatihan dan pendampingan teknologi menjadi masukan strategis yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah kabupaten perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jangkauan dan efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalankan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan program, pemutakhiran data pelaku UMKM, dan penyusunan pelatihan berbasis kebutuhan nyata seperti digital marketing harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pelaku usaha mandiri seperti Ibu Satini dapat berkembang lebih optimal dan tidak merasa terpinggirkan dari proses pembangunan ekonomi lokal. Ini penting untuk menciptakan sistem pemberdayaan yang adil, adaptif, dan benar-benar memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.



Dokumen Tempat Usaha Ibu Satini

Berdasarkan penjelasan dan beberapa pernyataan diatas selanjutnya ada penjelasan juga dari Ibu Imas yang mangatakan bahwa:

Dalam wawancara bersama Ibu Imas, salah satu pelaku usaha mandiri, disampaikan bahwa dirinya pernah mendaftarkan usahanya untuk bergabung dalam program UMKM yang dikelola oleh pemerintah kalurahan, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan ataupun balasan. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan pengembangan UMKM, pelaku usaha kecil yang belum terdaftar tidak dilibatkan, sehingga akses terhadap informasi dan pembinaan menjadi sangat terbatas. Tempat usaha yang digunakan pun merupakan fasilitas sewa milik pemerintah kalurahan. Ibu Imas turut menyampaikan aspirasi terkait masalah saluran pembuangan air yang berada dekat dengan lokasi usahanya, namun belum juga mendapat respon dari pihak terkait. “Masih terlihat adanya prioritas bagi nama-nama tertentu saja dalam pengembangan UMKM, padahal banyak usaha kecil keluarga yang juga butuh dukungan. Dulu hasil usaha bisa terjual banyak saat ada event, tapi sekarang mulai menurun karena kegiatan seperti itu makin jarang,” ungkap Ibu Imas dengan harapan agar semua pelaku usaha mendapat kesempatan yang adil untuk berkembang. (Wawancara, 18 juli 2025)

Dari hasil wawancara Ibu Imas menyoroti persoalan serius dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di tingkat kalurahan,

yaitu terkait eksklusivitas, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya respons institusional. Meskipun telah berinisiatif mendaftarkan usahanya untuk bergabung dalam program UMKM, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah kalurahan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem komunikasi dan manajemen data pelaku usaha, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan program. Ketidakterlibatan pelaku usaha kecil yang belum terdaftar dalam kegiatan sosialisasi dan pengembangan UMKM menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan belum inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, terutama mereka yang masih mandiri dan kurang terdampingi.

Keluhan mengenai ketimpangan perhatian, di mana program terkesan hanya memprioritaskan “nama-nama tertentu”, menimbulkan kesan adanya eksklusivitas dalam pelaksanaan program yang seharusnya bersifat adil dan merata. Hal ini berpotensi menciptakan kecemburuan sosial serta menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. Selain itu, tidak ditanggapinya aspirasi Ibu Imas terkait masalah lingkungan usaha seperti saluran pembuangan air menunjukkan lemahnya respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar pelaku UMKM. Padahal, aspek lingkungan fisik usaha sangat memengaruhi kenyamanan, kebersihan, dan kelangsungan operasional.

Penurunan penjualan akibat semakin jarang event-event promosi juga memperlihatkan kurangnya kesinambungan dalam

strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Dulu, kegiatan semacam itu menjadi peluang penting bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar. Ketika frekuensinya menurun tanpa ada pengganti yang relevan seperti pelatihan digital marketing atau penciptaan pasar online maka pelaku UMKM cenderung stagnan atau bahkan mengalami penurunan pendapatan. Harapan Ibu Imas agar semua pelaku usaha diberi kesempatan yang adil sangat relevan dan mendesak. Pemerintah kalurahan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola UMKM, memperbaiki sistem pendataan, memperluas partisipasi, dan membangun mekanisme umpan balik yang responsif. Hanya dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, pemberdayaan UMKM dan UMKM bisa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil dan efektif di tingkat desa.



Dokumen tempat usaha UMKM Ibu Imas

Berdasarkan penjelasan dan beberapa pernyataan diatas selanjutnya ada penjelasan juga dari Ibu RT 05 yang mangatakan bahwa:

Dalam wawancara bersama Ibu RT 05, disampaikan bahwa fasilitasi dari pemerintah terhadap ibu-ibu pelaku usaha kecil masih belum merata. Ia menyampaikan keresahannya secara pribadi, karena dirinya juga memiliki usaha kecil di rumah dan merasakan langsung bagaimana sulitnya mendapatkan perhatian atau dukungan dari pemerintah kalurahan. Bersama ibu-ibu lain di wilayahnya, ia pernah berinisiatif untuk bersatu dan menyusun proposal agar bisa mendapatkan bantuan yang dapat menunjang usaha serta meningkatkan UMKM masing-masing. “Kami sadar bahwa di kalurahan setiap potensi atau kebutuhan masyarakat harus diajukan melalui proposal terlebih dahulu, tapi sampai sekarang proposal yang kami buat belum mendapatkan perhatian atau tindak lanjut yang jelas,” ujar Ibu RT dengan nada kecewa. Ia berharap agar ke depan pemerintah kalurahan lebih responsif terhadap inisiatif warga, dan tidak hanya memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu saja, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha kecil, terutama ibu-ibu rumah tangga yang sedang berjuang menghidupi keluarga melalui usaha mandiri. (Wawancara, 18 juli 2025)

Dari hasil wawancara Ibu RT 05 memperkuat gambaran adanya ketimpangan dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil di tingkat kalurahan, khususnya di kalangan ibu rumah tangga. Keluhan mengenai fasilitasi yang belum merata menunjukkan bahwa distribusi perhatian dan dukungan dari pemerintah desa masih cenderung terfokus pada kelompok tertentu, sementara kelompok-kelompok warga yang berinisiatif secara mandiri justru sering kali terabaikan. Inisiatif Ibu RT dan kelompok ibu-ibu di wilayahnya untuk menyusun proposal bantuan merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, yang seharusnya mendapatkan apresiasi dan respons cepat dari pihak pemerintah. Namun, kenyataan bahwa proposal

tersebut tidak ditindaklanjuti menunjukkan lemahnya sistem komunikasi dan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi warga yang bergerak dari bawah (*bottom-up initiative*).

Lebih jauh, pernyataan bahwa pengajuan bantuan harus melalui proposal menggambarkan adanya prosedur administratif yang cukup kaku, yang jika tidak diimbangi dengan pendampingan, justru bisa menjadi penghalang bagi masyarakat yang kurang memahami teknis birokrasi. Kondisi ini menciptakan eksklusi terselubung, di mana hanya mereka yang memiliki akses dan pengetahuan administratif yang dapat mengikuti program secara efektif. Hal ini berisiko memperdalam kesenjangan antara pelaku usaha yang sudah terfasilitasi dan mereka yang masih berjuang secara mandiri tanpa dukungan kelembagaan.

Kekecewaan Ibu RT menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah kalurahan untuk lebih responsif, terbuka, dan adil dalam menyikapi setiap bentuk aspirasi warga, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah desa perlu memperbaiki sistem umpan balik, memperluas cakupan fasilitasi, dan melakukan pendataan ulang terhadap pelaku usaha kecil agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Selain itu, pendampingan dalam proses administratif seperti penyusunan proposal harus dilakukan secara aktif agar masyarakat tidak hanya dibebani prosedur, tetapi juga dibantu untuk mengakses haknya. Dalam konteks ini, inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan agar pembangunan benar-benar menjangkau seluruh warga



tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kalurahan telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam mendorong pengembangan UMKM dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai strategi telah dijalankan, seperti pendataan UMKM secara sistematis, penyelenggaraan pelatihan (termasuk digital marketing dan pengemasan produk), pembentukan kelompok usaha berdasarkan jenis profesi, serta penyediaan stand-stand promosi dalam event lokal. Upaya legalisasi usaha melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga menjadi langkah penting untuk membuka akses pelaku usaha terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah dan lembaga eksternal. Program-program seperti *Desa Prima* dan *Desa Premier* secara khusus memberikan perhatian pada pemberdayaan perempuan dan keluarga, yang selama ini menjadi fondasi ekonomi rumah tangga namun kerap kurang terakomodasi dalam kebijakan formal.

Namun demikian, hasil wawancara juga menyoroti bahwa pelaksanaan program di tingkat akar rumput masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Ketimpangan dalam penyebaran informasi, keterbatasan sosialisasi, serta kurangnya kesinambungan dan pemerataan bantuan menjadi kendala utama. Beberapa pelaku usaha, meskipun telah aktif dan berpengalaman selama bertahun-tahun, belum pernah tersentuh oleh pelatihan atau fasilitasi apa pun dari pemerintah.

Situasi ini mengindikasikan lemahnya sistem pendataan dan manajemen UMKM yang menyebabkan tidak semua pelaku usaha memperoleh akses terhadap peluang yang ada. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat juga menghambat adaptasi pelaku usaha terhadap tuntutan pasar modern yang semakin mengandalkan teknologi informasi dan pemasaran daring.

Menariknya, dengan adanya pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program pusat dan penyusunan proposal bantuan oleh kelompok ibu rumah tangga, yang mencerminkan adanya semangat kemandirian, solidaritas, dan partisipasi aktif warga dalam memperkuat ekonomi komunitas. Sayangnya, beberapa dari inisiatif ini belum mendapatkan respons atau dukungan yang memadai dari pemerintah, baik karena keterbatasan komunikasi, lambannya proses birokrasi, maupun ketiadaan mekanisme umpan balik yang jelas dan inklusif. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas implementasi di lapangan, serta pentingnya membangun sistem pemerintahan desa yang lebih responsif, terbuka, dan partisipatif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengembangan UMKM di tingkat desa tidak cukup hanya dengan menyediakan program-program berbasis teknis. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan kelembagaan lokal, perbaikan sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penyusunan program berdasarkan kebutuhan riil

warga yang didasarkan pada data yang valid dan terbaru. Pendampingan yang konsisten, pelibatan masyarakat dalam semua tahapan program, serta keadilan dalam distribusi fasilitasi menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan inklusif. Pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan UMKM bergantung pada kemampuan pemerintah kalurahan untuk menjalin kemitraan erat dengan warganya, menjadikan mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam proses pembangunan ekonomi yang berkeadilan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM, maka dapat di ambil dua kesimpulan utama sebagai berikut:

##### **1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi Dalam Fasilitasi Pengembangan UMKM**

Pemerintah Kalurahan Triwidadi menunjukkan fasilitasi yang cukup baik dalam menginisiasi dan memfasilitasi berbagai program pengembangan UMKM. Hal ini tercermin dari beragam bentuk fasilitasi yang telah dilakukan, seperti pendataan pelaku UMKM secara menyeluruh, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan digital marketing, pembentukan kelompok usaha berdasarkan jenis profesi, serta penyediaan stand promosi untuk mendorong pemasaran produk lokal. Pemerintah juga memfasilitasi legalitas usaha melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan langkah penting dalam mendukung keberlanjutan dan akses pelaku UMKM terhadap bantuan formal.

Program-program seperti *Desa Prima* dan *Desa Premier* menjadi manifestasi konkret dari keberpihakan terhadap perempuan dan keluarga sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi desa. Selain itu, perhatian terhadap infrastruktur dasar, seperti penyediaan tempat usaha dan listrik, memperlihatkan adanya kesadaran terhadap pentingnya

dukungan sarana fisik dalam kelangsungan usaha masyarakat. Pemerintah juga membangun kerja sama lintas sektor dengan DPMK, LPMK<sub>al</sub>, BUMK<sub>al</sub>, dan pendamping desa guna memperkuat pelaksanaan program-program pemberdayaan.

Namun demikian, efektivitas kapasitas tersebut masih belum optimal karena belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha di kalurahan. Beberapa pelaku UMKM yang telah lama menjalankan usaha mengaku belum pernah terlibat dalam pelatihan atau kegiatan sosialisasi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendataan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, keterbatasan literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program berbasis teknologi. Pendekatan yang digunakan pemerintah masih cenderung bersifat administratif dan teknokratis, belum sepenuhnya partisipatif dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi dalam Pengembangan UMKM**

Fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM tidak lepas dari adanya faktor-faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaannya. Salah satu faktor pendukung utama adalah sinergi kelembagaan antara pemerintah kalurahan dengan lembaga eksternal seperti DPMK, serta komitmen aparatur desa dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis keluarga. Partisipasi warga, meskipun belum merata, juga menjadi energi positif yang mendukung

keberlanjutan program. Pembentukan Koperasi Merah Putih yang berasal dari program pemerintah pusat dan penyusunan proposal oleh kelompok ibu rumah tangga menjadi indikasi adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi.

Namun, berbagai faktor penghambat masih sangat dominan dan menjadi tantangan nyata. Di antaranya adalah kurangnya pemerataan informasi dan akses terhadap program, lemahnya sistem pendataan UMKM, serta keterbatasan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan pemasaran digital. Beberapa pelaku usaha juga mengeluhkan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah terhadap aspirasi atau proposal yang diajukan. Prosedur administratif yang kaku tanpa pendampingan membuat beberapa kelompok warga kesulitan mengakses bantuan, meskipun mereka telah menunjukkan inisiatif yang kuat.

Selain itu, faktor sosial-budaya seperti rendahnya minat dan partisipasi warga dalam kegiatan pemerintah juga menjadi penghambat tersendiri. Hal ini terjadi akibat belum kuatnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, serta minimnya sistem umpan balik yang memungkinkan aspirasi warga dapat tersalurkan dan ditindaklanjuti secara cepat dan adil. Kesenjangan antara kelompok yang sudah difasilitasi dan yang belum terlibat semakin memperlebar ketimpangan partisipasi dalam program-program pengembangan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadun, A. (2019). Pemberdayaan UMKM Bagi Usaha Keluarga Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kampung Jangkar Desa Mekarwangi Cariu Bogor. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.52643/pamas.v3i1.376>
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175–2183.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Erialdy, Ade Indra Permana, S. L. P. (2021). Upaya Peningkatan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19. 5(5), 1158–1163. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.7753>
- Hermanto, L. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 160–188. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2017>
- Krisjuyani, S. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 198–205. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.735>
- Londa, V. Y. (2020). Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha di Daerah Penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 10(2), 63–71.
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 87–94. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3698>
- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, P. C. W. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan UMKM (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 79–87. <https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>
- Monika, Andini, S. Sudadio, S. S. (2019). Pengaruh Sikap dan Minat Belajar terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Paket C. *Journal of Nonformal*

*Education and Community Empowerment*, 3(2), 173–184.  
<https://doi.org/10.15294/pls.v2i1.23448>

Murdani, M., Widayani, S., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2), 152–157. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.15294/abdimas.v23i2.17893>

Saru Arifin, Rahayu Fery Anitasari, Laga Sugiarto, R. A. (2019). *Saru Arifin, Rahayu Fery Anitasari, Laga Sugiarto, Riska Alkadri Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. 01(2), 134–151.

Undaan, K. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116.  
<https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



## **B. Saran**

1. Pemerintah Kalurahan Triwidadi diharapkan mampu meningkatkan fasilitas secara lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pengembangan UMKM
2. Perlu dilakukan penguatan sistem pendataan dan pemetaan pelaku UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah kalurahan harus memiliki data valid dan mutakhir agar pelaku usaha yang potensial tidak terlewat dari program fasilitasi.
3. Sosialisasi program perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih menjangkau, tidak hanya secara administratif tetapi juga personal, misalnya melalui kunjungan langsung ke masyarakat, penggunaan media sosial desa, atau membentuk forum-forum warga. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal aspirasi resmi dan responsif untuk menampung inisiatif serta keluhan masyarakat.
4. Pelatihan digital marketing dan teknologi usaha harus menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi desa, karena kebutuhan pasar saat ini menuntut pelaku usaha untuk melek teknologi. Program pelatihan tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala dengan pendampingan yang berkesinambungan.
5. Inisiatif warga seperti koperasi atau kelompok usaha mandiri harus didukung melalui penguatan kelembagaan, pelatihan manajerial, serta pendanaan mikro yang fleksibel. Pemerintah harus hadir sebagai mitra aktif, bukan sekadar regulator.

6. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan agar kegiatan yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan membangun sistem yang inklusif dan partisipatif, Pemerintah Kalurahan Triwidadi dapat menjadi pelopor dalam menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi, adil dalam distribusi bantuan, serta tangguh menghadapi tantangan ekonomi berbasis keluarga.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
1	Slamet Riyanto	47 Tahun	Laki-laki	Lurah
2	Anita Yulia F, A.Md.KL	34 Tahun	Perempuan	Carik
3	Mulyadi	54 Tahun	Laki-laki	Kasi Ulu-ulu
4	Sarjul	60 Tahun	Laki-laki	Masyarakat
5	Sarwedih	55 Tahun	Perempuan	Masyarakat
6	Suttekenyo	41 Tahun	Laki-laki	Masyarakat
7	Satini	59 Tahun	Perempuan	Masyarakat
8	Imas	39 Tahun	Perempuan	Masyarakat
9	widih	40	Perempuan	Ibu RT

### **B. Daftar Pertanyaan kepada Pemerintah Kalurahan Triwidadi**

1. Apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Jambean, Kalurahan Triwidadi?
2. Apa saja upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM?
3. Bagaimana pengambilan keputusan terkait kebijakan dalam merespon usaha UMKM yang saat ini dikelola?
4. Apakah pemerintah memberi fasilitas bagi pelaku usaha UMKM?
5. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam membahas potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh kalurahan?
6. Apa hambatan yang dihadapi dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan UMKM?

7. Bagaimana pemerintah melihat UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat?
8. Apakah ada kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi berbasis keluarga?

**C. Daftar Pertanyaan kepada Masyarakat Pemilik Usaha**

1. Apa sumber daya yang anda miliki dalam usaha ini?
2. Apakah modal usaha ini dari anda sendiri atau dari pemerintah?
3. Apa kebijakan pemerintah dapat memberi dampak positif bagi usaha anda?
4. Apakah anda dilibatkan oleh pemerintah dalam membahas terkait pengembangan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat?
5. Apa hambatan anda dalam menjalankan usaha ini?
6. Apa harapan anda bagi pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki?
7. Apakah ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam mengembangkan usaha ini?
8. Bagaimana anda melihat kinerja pemerintah dalam upaya mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki masyarakat?

**Dokumentasi**





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM TINGKAT PENDIDIKAN S1, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK DESA

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK DESA

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515089, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 394/1/I/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
Di tempat.

Dengan hormat,

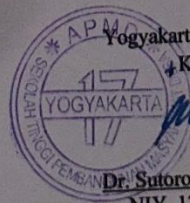
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Jozerizal Aritd Hanief Titit  
No Mhs : 21520065  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Kelurahan dalam Pengembagan Ekonomi Keluarga  
Tempat : Padukuhan Jambean, Kelurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 2 Juli 2025

Ketua

*[Signature]*  
**Dr. Sutoro Eko Yunanto**  
NID. 170 230 190

Surat Penelitan





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH  
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 226/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Jozerizal Aritd Hanief Titit  
Nomor Mahasiswa : 21520065  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Padukuhan Jamban, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul  
b. Sasaran : Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pengembanagan Ekonomi Keluarga  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 2 Juli 2025



Ketua

*Dr. Sutoro Eko Yunanto*  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kalurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Tugas



Foto bersama pak lurah



Foto bersama pak ulu-ulu



Foto bersama pak sutteknyo



Foto bersama ibu sarwedih





Foto bersama ibu satini



foto bersama ibu imas



Foto bersama ibu carik



Foto bersama pak sarjul